

**EVALUASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU)
DI GAMPONG SEUTUI KECAMATAN BAITURRAHMAN
KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**RISKA PUTRI
NIM. 190802048**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M / 1445 H**

PERNYATAAN KEAHLIAN ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Riska Putri
NIM : 190802048
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat/ Tanggal Lahir : Lhoknga, 14 Oktober 2001
Alamat : Lhoknga

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulis skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Juni 2023

Yang Menyatakan




RISKA PUTRI

**EVALUASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI
GAMPONG SEUTUI KECAMATAN BAITURRAHMAN KOTA BANDA
ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

RISKA PUTRI

NIM. 190802048

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Yuni Roslaili, M. A

NIP. 197206102014112001



Zakki Fuad Khalil, S.IP., M. Si

NIP. 199011192022031001

**EVALUASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI
GAMPONG SEUTUI KECAMATAN BAITURRAHMAN KOTA
BANDA ACEH**

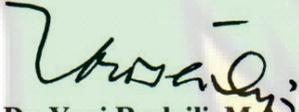
SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 25 Juli 2023 M
07 Muharram 1445 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

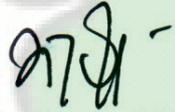
Ketua,


Dr. Yuni Roslaili, M.A.
NIP. 197206102014112001

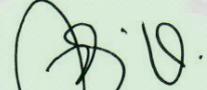
Skretaris,


Zakki Fuad Khalil, S.I.P., M. Si
NIP. 199011192022031001

Penguji I,


Eka Januar, M.Soc. Sc
NIP. 198401012015031003

Penguji II,


Candra Adi Kurnia, S.T., MBA
NIP. 198306102009041004

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Dilaksanakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) pada kawasan perkotaan untuk mengatasi tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru dan penghidupan yang berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2011 tentang kawasan dan perumahan permukiman serta penetapan lokasi perumahan kumuh. Program Kotaku juga dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh yang telah dilaksanakan salah satunya pada Gampong Seutui. Adapun permasalahan yang terjadi di Gampong Seutui berupa kepadatan bangunan gedung, jalan lingkungan yang rusak, penyediaan air minum yang belum memenuhi standar kesehatan, sarana drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh sudah berjalan secara maksimal dalam mengatasi permukiman kumuh. Namun, evaluasi terhadap Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) masih terjadinya hambatan yaitu kepadatan jumlah penduduk dan kurangnya kesadaran masyarakat sekitar dalam berpartisipasi untuk melaksanakan program Kotaku yang dijalankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sangat efektif untuk mengatasi permukiman kumuh dan menangkal permukiman kumuh baru.

Kata Kunci: Evaluasi, Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat, Rahmat, tauhid, hidayah serta karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“EVALUASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI GAMPONG SEUTUI KECAMATAN BAITURRAHMAN KOTA BANDA ACEH”**. Shalawat beserta salam tidak lupa saya sampaikan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah menompang umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan. Saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun oleh peneliti guna untuk menyelesaikan salah satu syarat untuk menjejakkan tugas akhir yang berupa skripsi dalam rangka untuk memperoleh gelar sarjana pada program Strata-1 di jurusan Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Kota Banda Aceh. Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dukungan dari beberapa pihak. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulisan banyak menerima bimbingan, petunjuk, saran dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak baik yang bersifat moral maupun material. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman M. Ag. Rektor UIN Ar-Raniry Kota Banda Aceh
2. Dr. Muji Mulia, M. Ag. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan (FISIP),
UIN Ar-Raniry Kota Banda Aceh
3. Muazzinah, B, Sc., MPA. Ketua program Studi (Prodi) Ilmu Administrasi
Negara, UIN Ar-Raniry Kota Banda Aceh
4. Dr. Yuni Roslaili, M.A. Pembimbing I yang telah membimbing, dan
memberikan saran dan masukan serta waktu bagi peneliti dalam menyelesaikan
skripsi ini
5. Zakki Fuad Khalil, S. IP., M. Si. Pembimbing II yang telah membimbing dan
memberikan saran dan masukan serta waktu bagi peneliti dalam menyelesaikan
skripsi ini.
6. Siti Nur Zalikha, M.Si. Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara dan
Pembimbing Akademik yang juga memberikan semangat dan motivasi kepada
peneliti untuk menyelesaikan skripsi
7. Seluruh dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan
ilmu dan pengetahuan serta bimbingan selama rutinitas perkuliahan
8. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa Ilmu Administrasi Negara
Angkatan 2019 yang penulis cintai karena dapat saling membantu, bekerja sama
dan memberikan masukan untuk penulis skripsi ini.
9. Serta yang istimewa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang
tua tercinta yang telah mengasuh, mendidik, membimbing, membina, menjaga,
memberikan dukungan serta selalu mendoakan untuk kelancaan penulis dalam
mengejarkan skripsi. Dan kepada seluruh kerabat atau saudara-saudara yang

telah memberikan semangat dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan dalam pengerjaan skripsi ini.

Peneliti tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, hanya kepada Allah SWT peneliti serahkan semua kebaikannya. Dalam penyusunan skripsi ini terdapat kekurangan, oleh sebab itu penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang membantu penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Akhir kata semoga dalam pembuatan skripsi ini penulis mengharapkan semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca.

Banda Aceh, 10 Juli 2023

Penulis,

Riska Putri
NIM. 190802048

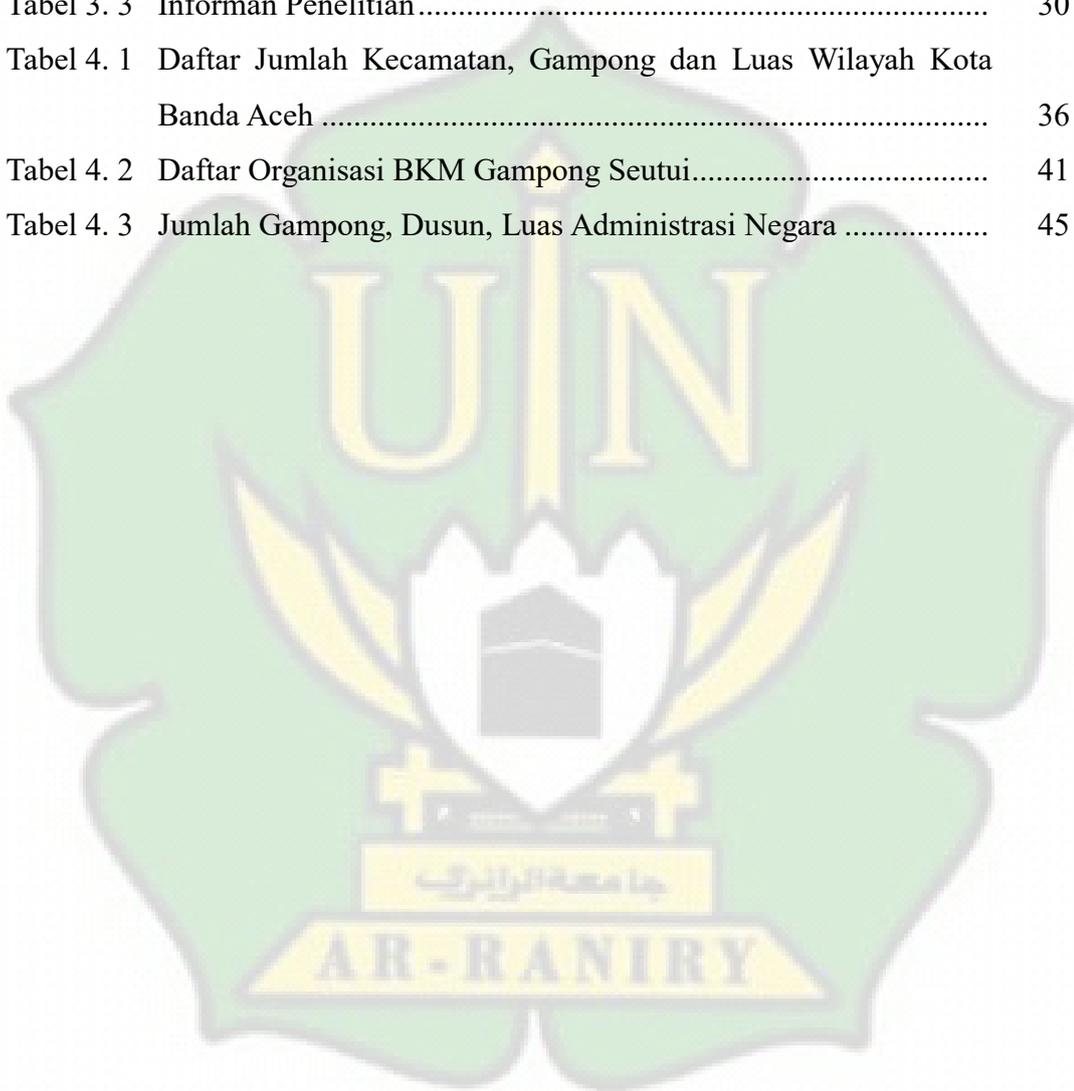
DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	Error! Bookmark not de
PERNYATAAN KEAHLIAN ILMIAH	Error! Bookmark not de
LEMBARAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not de
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG	Error! Bookmark not de
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Penjelasan Istilah	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Penelitian Terdahulu	8
2.2. Teori Kebijakan	12
2.2.1. Pengertian Kebijakan	12
2.3. Teori Evaluasi Kebijakan	14
2.3.1. Pengertian Evaluasi	14
2.3.2. Pendekatan Evaluasi	15

2.3.3.	Jenis dan Pelaksanaan Evaluasi	16
2.3.4.	Kriteria Evaluasi.....	17
2.4.	Konsep Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	18
2.4.1.	Pengertian Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	18
2.4.2.	Karakteristik Permukiman Kumuh	19
2.5.	Kerangka Berfikir.....	23
BAB III METODE PENELITIAN		26
3.1.	Desain Penelitian.....	26
3.2.	Fokus Penelitian	26
3.3.	Lokasi dan Waktu Penelitian	28
3.4.	Sumber Data	28
3.5.	Informan Penelitian	30
3.6.	Teknik Pengumpulan Data	32
3.7.	Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		35
4.1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
4.2.	Pembahasan.....	43
BAB V PENUTUP		75
5.1.	KESIMPULAN	75
5.2.	SARAN	76
DAFTAR PUSTAKA.....		77
DAFTAR LAMPIRAN		80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		89

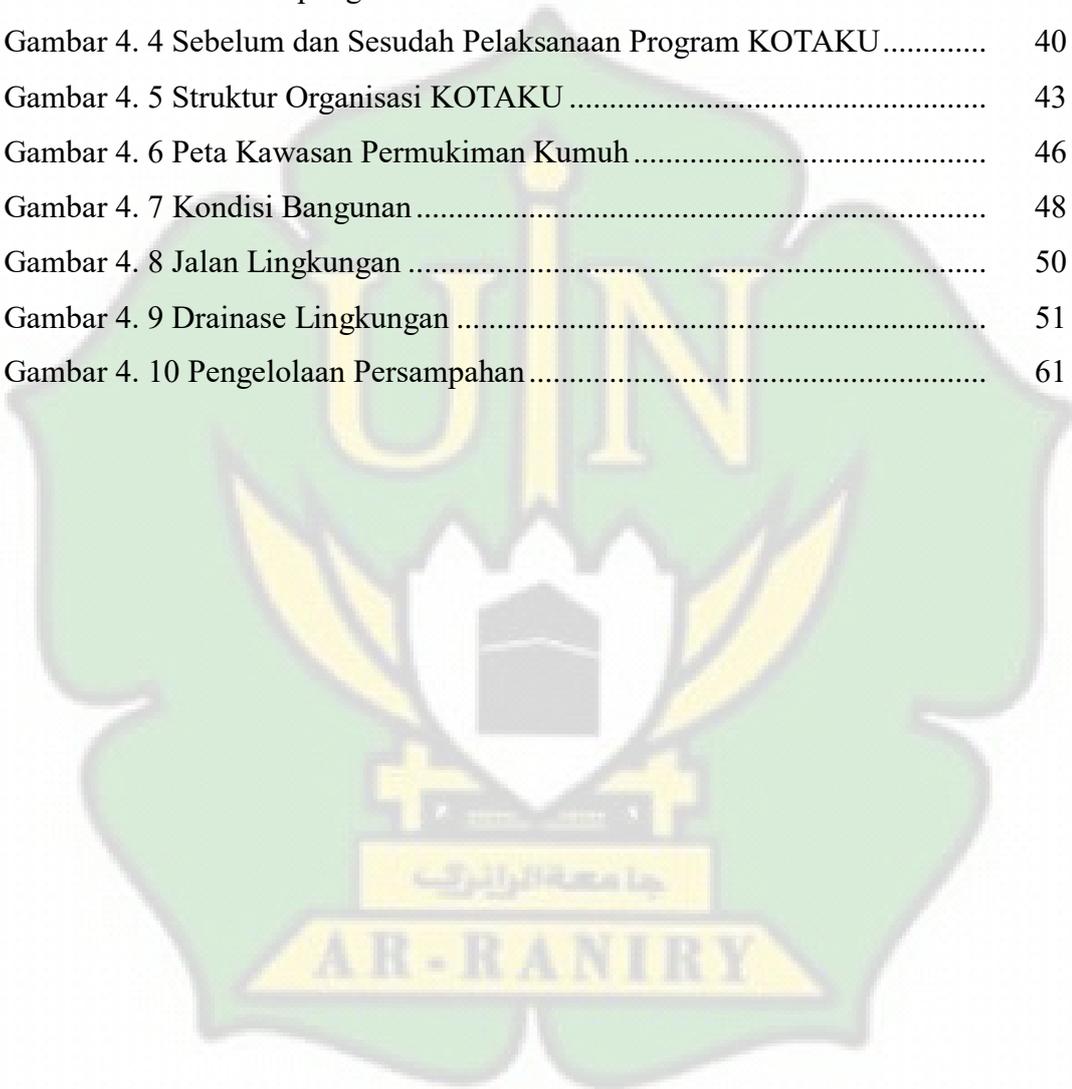
DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1	Indikator Evaluasi Dalam Peogram KOTAKU	27
Tabel 3. 2	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Program KOTAKU ..	27
Tabel 3. 3	Informan Penelitian	30
Tabel 4. 1	Daftar Jumlah Kecamatan, Gampong dan Luas Wilayah Kota Banda Aceh	36
Tabel 4. 2	Daftar Organisasi BKM Gampong Seutui.....	41
Tabel 4. 3	Jumlah Gampong, Dusun, Luas Administrasi Negara	45



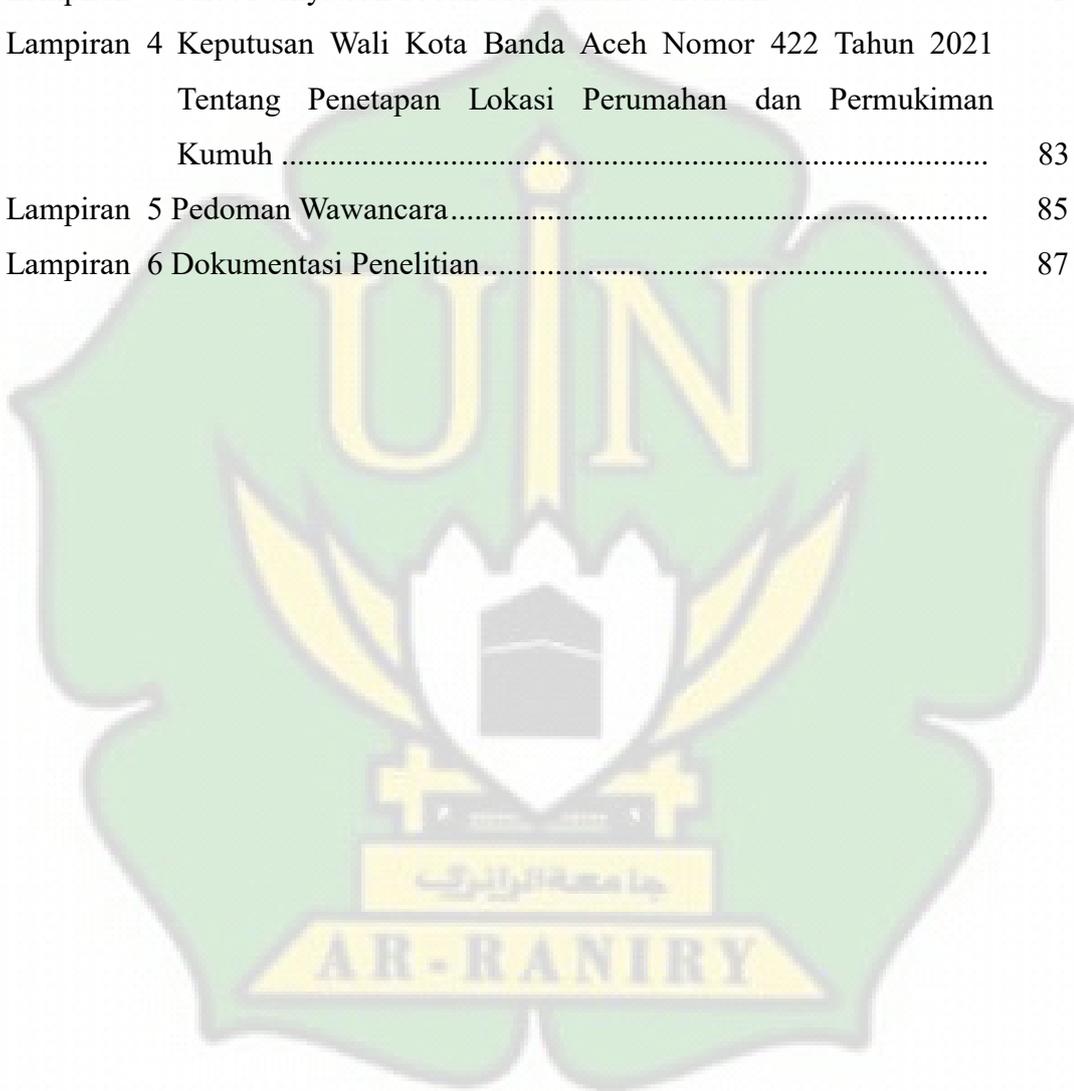
DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Peta Kota Banda Aceh.....	36
Gambar 4. 2 Jumlah Kelamin dan Umur	37
Gambar 4. 3 Peta Gampong Seutui	39
Gambar 4. 4 Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Program KOTAKU.....	40
Gambar 4. 5 Struktur Organisasi KOTAKU	43
Gambar 4. 6 Peta Kawasan Permukiman Kumuh	46
Gambar 4. 7 Kondisi Bangunan	48
Gambar 4. 8 Jalan Lingkungan	50
Gambar 4. 9 Drainase Lingkungan	51
Gambar 4. 10 Pengelolaan Persampahan.....	61



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Keputusan Pembimbing Skripsi	80
Lampiran 2 Surat Permohonan Penelitian.....	81
Lampiran 3 Surat Pernyataan Sudah Melakukan Penelitian.....	82
Lampiran 4 Keputusan Wali Kota Banda Aceh Nomor 422 Tahun 2021 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	83
Lampiran 5 Pedoman Wawancara.....	85
Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian.....	87



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Suatu kebijakan dan program yang dilaksanakan maka selalu adanya evaluasi menyertainya.¹ Hal ini penting disebabkan karena pertumbuhan penduduk yang terus terjadi telah menimbulkan dampak terhadap berbagai aspek kehidupan terutama di wilayah perkotaan. Salah satu aspek yang sangat terasa adalah semakin sulitnya memenuhi kebutuhan perumahan atau tempat tinggal bagi penduduk, maka terbatasnya kemampuan untuk membangun perumahan yang layak serta semakin terbatasnya lahan perkotaan untuk membangun permukiman yang mencukupi dan memenuhi syarat. Penduduk yang semakin bertambah disertai arus urbanisasi yang tinggi, maka masalah pembangunan dalam hal ini penyediaan sarana permukiman menjadi semakin mendesak terutama di daerah perkotaan yang menyebabkan ketimpangan pembangunan.²

Pembangunan dan pengembangan permukiman perkotaan melalui pengelolaan kualitas lingkungan kawasan permukiman, mencegah berkembangnya permukiman kumuh baru dan penghidupan yang berkelanjutan.³ Evaluasi ialah proses penggambaran, pencarian, dan memberikan informasi yang sangat berguna bagi pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan, bagaimana

¹ Chadijah Arifin, *Evaluasi Program Kotaku Dalam Penanganan Kumuh Kota Parepare*, (Makassar, Universitas Bosowo Makassar, 2022)

² Yulvira B. Tangketau, *Evaluasi Program Kotaku Dalam Penanganan Permukiman Kumuh*, (Makassar, Universitas Hasanuddin, 2021),

³ Yunita Syahpriani, Muh. Ilham, Nuryanto, *Evaluasi Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat*, Volume 12 Nomor 1, 2020.

mengevaluasi sesuatu berdasarkan kemampuan atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya kemudian untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian diperoleh dengan membuat keputusan tentang objek yang dinilai.⁴ Program ini diakhiri dengan evaluasi guna memastikan apakah program tersebut berhasil menjalankan fungsi sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun ada lima tahap, a) pendataan, b) perencanaan, c) pelaksanaan, d) keberlanjutan, dan e) evaluasi.⁵

Terkait evaluasi kegiatan terhadap peningkatan kualitas kawasan kumuh menjadi non kumuh yang berkelanjutan dengan dukungan dan partisipasi masyarakat. Menurut Undang-undang No 1 Tahun 2011, kawasan permukiman kumuh adalah kawasan yang tidak layak huni akibat konstruksi yang memenuhi syarat, kepadatan yang tinggi, kualitas pekerjaan dan peralatan, serta infrastruktur yang tidak memenuhi persyaratan. Penurunan terhadap kualitas penduduk oleh karena itu pemerintah mendirikan KOTAKU untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan mencegah munculnya permukiman kumuh baru dengan kegiatan terhadap entitas suatu kawasan permukiman. Kegiatan penanganan kumuh ini meliputi pembangunan infrastruktur serta pendampingan sosial dan ekonomi untuk keberlanjutan penghidupan masyarakat yang lebih baik yang ada di lokasi permukiman kumuh terhadap pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).⁶

⁴ Dapit Saleh, *Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)*, Di Kota Suka Bumi, Jurnal Inovasi Penelitian, Volume 2 Nomor 5, 2021.

⁵ <https://kotaku.pu.go.id/page/6880/tentang-program-kota-tanpa-kumuh-kotaku>

⁶ <https://perkim.id/kawasan-kumuh/program-program-dalam-pencegahan-dan-peningkatan-kualitas-kawasan-kumuh/>

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah program yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam mengatasi permukiman kumuh. Dengan tujuan tersebut terkandung dua maksud, yakni pertama, memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman kumuh perkotaan. Kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, berbasis masyarakat dan partisipasi pemerintah daerah.⁷ Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dilakukan untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung gerakan 100-0-100 yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh dan 100 persen akses sanitasi layak. Program KOTAKU ini dilaksanakan di 269 Kabupaten atau Kota di 34 Provinsi.⁸

Provinsi Aceh adalah salah satu Kota yang dilaksanakannya program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), dengan adanya kumuh ini ditegaskan bahwa kumuh harus ditangani karena rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) sebelumnya mendorong Kota Tanpa Kumuh, kini mewujudkan Kota bebas kumuh dan ke depannya akan masuk step berikutnya yaitu menjadi kota layak huni. Tentunya dengan didukung infrastruktur yang layak, keberhasilan penataan kawasan kumuh melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan hasil dari kolaborasi dan peran aktif masyarakat, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah serta lembaga terkait lainnya.⁹ Kota Banda Aceh meliputi

⁷ Rahmi Putri Joni, Skripsi: *Evaluasi Pelaksanaan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Di Kota Pekanbaru, Studi Kasus: Kelurahan Pesisir Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru*, (Pekanbaru, Universitas Islam Riau, 2019), hlm 2

⁸<https://perkim.id/kawasan-kumuh/program-program-dalam-pencegahan-dan-peningkatan-kualitas-kawasan-kumuh/>

⁹ <https://pupr.acehprov.go.id/>

9 Kecamatan dan 90 Desa dengan dengan luas wilayah keseluruhan $\pm 61,36 \text{ km}^2$. Persentase luas kecamatan menunjukkan bahwa Kecamatan Syiah Kuala merupakan kecamatan di Kota Banda Aceh dengan luas wilayahnya sebesar 23.21% dari total wilayah Kota Banda Aceh. Sedangkan, kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Jaya Baru dengan persentase luas wilayah sebesar 6.16% dari luas wilayah Kota Banda Aceh perkecamatan.

Kecamatan Baiturrahman, Gampong Seutui yang menjadi tempat pelaksanaan program KOTAKU yang ada di SK Wali Kota Banda Aceh, sesuai dengan keputusan Walikota Kota Banda Aceh Nomor 372 Tahun 2014 tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Banda Aceh.¹⁰ Oleh karena itu adanya permasalahan yang terjadi di kawasan Seutui ialah Pertama, ketidak teraturan bangunan. Kedua, akses jalan lingkungan yang kurang memadai. Ketiga, penyediaan air minum yang belum memenuhi standar kesehatan. Keempat, drainase lingkungan. Kelima pengelolaan terhadap air limbah. Keenam, pengelolaan persampahan. Ketujuh, proteksi kebakran belum memadai.¹¹

Berdasarkan hasil dari penjelasan diatas bahwa peneliti ingin mengevaluasi keberhasilan Program KOTAKU untuk mengatasi permasalahan permukiman kumuh di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman. Dan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan suatu hal yang menarik dapat diteliti, dan peneliti bertujuan untuk dapat menambah pemahaman terhadap dampak program KOTAKU dalam penanganan terhadap perilaku masyarakat, kepedulian terhadap

¹⁰ <https://perkim.id/profil-pkp/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-kota-banda-aceh/>

¹¹ <https://kotaku.pu.go.id/view/9909/kolaborasi-memberi-keindahan-skala-kawasan-seutui-banda-aceh>

infrastruktur terbangun dan keberlanjutan program. Program KOTAKU ini yang telah dilaksanakan untuk mengetahui peran program KOTAKU dalam mengurangi permukiman kumuh di beberapa tempat, sehingga peneliti dapat melihat bahwa program KOTAKU ini berhasil dan bermanfaat bagi masyarakat dengan mengubah permukiman yang layak.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, maka adanya rumusan masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat terhadap pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang ada di Gampong Seutui?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil rumusan masalah diatas yang menjadi sebuah tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang ada di Gampong Seutui.
2. Untuk mengetahui adanya faktor pendukung dan faktor penghambat terhadap pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam meningkatkan kawasan permukiman kumuh yang ada di Gampong Seutui.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Manfaat Praktis

- a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada Kawasan kumuh
- b. Menurunnya luasan Kawasan kumuh karena akses infrastuktur dan pelayanan perkotaan yang lebih baik

2. Manfaat Teoritis

- a. Peneliti mampu memberi referensi atau bahan rujukan agar bisa digunakan oleh peneliti selanjutnya, sebagai bahan terhadap program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
- b. Sebagai salah satu sumber data, informasi, dan referensi tambahan dalam ilmu administrasi publik.

1.5. Penjelasan Istilah

Adapun dalam skripsi ini terdapat istilah dalam penelitian

Evaluasi : Untuk menentukan nilai sesuatu dengan cara membandingkan dengan kriteria umum dapat pula melakukan pengukuran terhadap sesuatu yang dievaluasikan kemudian membandingkan dengan kriteria tertentu. Dalam arti lain evaluasi adalah proses pengukuran dan mengevaluasikan suatu kegiatan yang bersifat hirarki.

Program KOTAKU : Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah program yang dilaksanakan untuk mengatasi permukiman. Program KOTAKU ini program yang dilaksanakan melalui platform kolaborasi antara pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi, Kota atau Kabupaten, masyarakat, stakeholder lainnya dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah Kabupaten sebagai pelaku utama.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini merupakan peneliti untuk mendapatkan perbedaan penelitian ada dengan penelitian yang dilaksanakan. Pada penelitian ini peneliti mencatumkan berbagai hasil penelitian yang ada terkait tentang evaluasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) selanjutnya membuat ringkasan. Berikut ini adalah penelitian yang berkaitan dengan tema penulis.

B. Liandri, T. Suheri, (2020), Jurnal Wilayah dan Kota, judul “Evaluasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Kelurahan Lebakgede Kecamatan Coblong Kota Bandung”. Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa kondisi kawasan sesudah penerapan program KOTAKU dan memperoleh program KOTAKU. Penelitian ini menggunakan pendekatan dekriptif kualitatif. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mencapai suatu indeks yang sudah terlaksanakan dalam pelaksanaan program KOTAKU terhadap akses jalan lingkungan, drainase lingkungan, pengadaan air bersih, pengolahan limbah, pengelolaan sampah, dan pengaman kebakaran. Kelurahan Lebakgede dinilai belum terpenuhi dalam pelaksanaannya sebab belum tercapai secara keseluruhan dalam meningkatkan akses sarana dan prasarana perkotaan dalam penataan lingkungan kawasan kumuh.¹²

¹² B. Liandri, T. Suheri, *Evaluasi Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Kelurahan Lebakgede Kecamatan Coblong Kota Bandung*, Jurnal Wilayah dan Kota, Volume 06 Nomor 02, 2020.

Irma, (2019), Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, judul “Evaluasi Tata Kelola Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kota Makassar, studi kasus kelurahan parang tambung”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dengan hasil penelitian bahwa tata kelola program Kota Tanpa Kumuh di Kota Makassar dari empat indikator yaitu 1) Konteks, berupa gambaran dan rincian serta tujuan dari program kota tanpa kumuh yang akan berjalan, 2) Masukan, melaksanakan perkumpulan mengenai program kota tanpa kumuh, 3) Proses pembangunan program kerja KOTAKU dengan pelaksanaan program melalui sosialisasi dengan masyarakat kelurahan. Dimana program kerja meliputi bidang sosial, pengembangan infrastruktur dan ekonomi, 4) Hasil, pelaksanaan program KOTAKU adalah perbaikan jalan, persampahan, penerangan jalan, perbaikan rumah, dan pelatihan-pelatihan untuk masyarakat. Program Kota Tanpa Kumuh kelurahan parang tambung sudah berjalan sesuai dengan program KOTAKU.¹³

Dapit Saleh, (2021), Jurnal Inovasi Penelitian, dengan judul “Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Sukabumi”. Penelitian yang menunjukkan bahwa untuk mengevaluasi program Kota Tanpa Kumuh di Kota Sukabumi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pelaksanaan program KOTAKU belum mencapai hasil yang optimal, masih banyak kawasan kumuh yang belum tertangani. Penanganan kawasan kumuh dilakukan secara prioritas dan bertahap

¹³ Irma, Skripsi: *Evaluasi Tata Kelola Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kota Makassar; Studi Kasus Kelurahan Parang Tambung*, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019).

sehingga membutuhkan waktu yang lama. Kurangnya pencegahan kawasan kumuh yang sudah ditangani agar kembali lagi menjadi lingkungan. Dan masih banyak masyarakat yang tinggal di pinggir rel, sungai yang kepemilikannya tidak jelas sehingga tidak tertangani.¹⁴

Rahmi Putri Joni, (2019), Skripsi, Universitas Islam Riau, dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) di Kota Pekanbaru, (studi Kasus: Kelurahan Pesisir Kecamatan Lima Puluh Kota Pekan Baru).” Bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di perkotaan dalam mewujudkan kawasan yang layak huni dan produktif. Dan mengevaluasi tingkat keberhasilan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Pesisir. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian program KOTAKU ini sudah terealisasi di Kota Pekanbaru salah satunya di Kelurahan Pesisir. Dalam pelaksanaan pembangunan program adanya teridentifikasi faktor penghambat dari pelaksanaan program kotaku dan faktor pendukung pelaksanaan program kotaku, yang menjadi ketidakberhasilan pelaksanaan karena ketidaksesuaian pelaksanaan SOP atau dokumen rencana, tidak konsisten terhadap pelaksanaan dan hasil yang terealisasi terdapat banyak ketidakseimbangan dalam kegiatan pembangunan infrastruktur yang belum terlaksanakan serta kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan dan

¹⁴ Dapit Saleh, *Evaluasi Program Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kota Suka Bumi Jurnal Inovasi Penelitian*, Volume 2 Nomor 5 ,2021.

peningkatan kualitas permukiman yang termaksud kedalam tingkat kesejahteraan rendah, sedang, dan tinggi.¹⁵

Endah Fitri Maulana, (2020), Skripsi dengan judul “Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Surakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar dalam mewujudkan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa Program KOTAKU telah berhasil mengurangi wilayah kumuh di Kelurahan Nusukan dan Semanggi secara bertahap.¹⁶

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas terkait dengan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Dan juga menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas terletak pada lokasi dimana pada penelitian ini lokasinya ada di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh yang tentunya memiliki karakteristik yang berbeda dengan penelitian terdahulu.

¹⁵ Rahmi Putri Joni, (2019), Skripsi: *Evaluasi Pelaksanaan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Di Kota Pekanbaru, Studi Kasus: Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru*, (Pekanbaru, Universitas Islam Riau, 2019).

¹⁶ Endah Fitria Maulana, (2020), Skripsi: *Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kota Surakarta*, (Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2020).

2.2. Teori Kebijakan

2.2.1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan ialah salah satu tindakan yang menuju pada suatu tujuan yang ditetapkan oleh sebagian stakeholder, kelompok, atau pemerintah dalam suatu kawasan tertentu yang berkaitan dengan adanya tantangan-tanganan tertentu dalam menemukan keuntungan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.¹⁷ David Easton mendefinisikan sebagai akibat aktivitas pemerintah yang dirumuskan tersebut tidak luput dari keputusan pemerintah. Kebijakan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang dilaksanakana. Suatu keputusan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa dan menyatu sebagai kebijakan publik. Dengan adanya suatu kegiatan, tujuan dan pemberitahuan pemerintah tentang masalah yang muncul semuanya dapat dilihat sebagai kegiatan.¹⁸

Dengan demikian kebijakan publik ialah langkah yang paling awal dalam menentukan sebuah proses kebijakan publik secara keseluruhan. Oleh karena itu, bagaimana yang terjadi pada tahap ini sangat menentukan tercapainya suatu kebijakan publik yang dilakukan pada masa yang mendatang.¹⁹ Kebijakan pada umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan untuk menentukan pedoman secara umum menjadi prinsip-prinsip berbuat dalam upaya mencapai suatu arah yang

¹⁷ Umi Arifah, Kebijakan Publik Dalam Anggaran Pendidikan, Jurnal Manajemen Pendidikan, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2018.

¹⁸ Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Surakarta: Sutoyo), tahun 2020, hlm 28-29

¹⁹ Nuryanti Mustari, *Buku Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: PT. Leutika Nouvalitera) Cetakan Pertama 2015, hlm 63

telah ditentukan. Kebijakan berasal dari pelaku atau sekelompok pelaku yang berada dalam sebuah program, kegiatan, aktivitas dalam arah yang telah ditentukan. Kebijakan ini ditetapkan oleh para pelaksana (stakeholder) dalam rangka memecahkan suatu persoalan tertentu.

Definisi mekanisme kebijakan menggambarkan sebagai bagian dari input, proses, dan output. Program atau kebijakan pemerintah dianggap sebagai input kebijakan sedangkan pembuatan dan implementasi kebijakan dianggap sebagai proses kebijakan. Isu dan strategi kebijakan dapat dilihat sebagai proses politik yang dilaksanakan oleh kelompok kepentingan dan kumpulan-kumpulan pendesak kepentingan. Hasil dari proses kebijakan adalah kinerja kebijakan. Oleh karena itu kebijakan tidak bersifat menetap. Kebijakan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu sebagai sebuah pengendalian atas persoalan yang sudah ada dan keperluan yang membantu.²⁰

Menurut Nugroho kebijakan publik di bagi dalam beberapa kategori yaitu: a) kepercayaan akan kebaikan, b) nilai-nilai dan norma-norma, c) institusional politik, d) proses politik, e) kebijakan publik, f) kinerja kebijakan atau kegagalan yang menghasilkan kepercayaan baru tentang kebaikan memperkuat adanya kebijakan. Dalam proses kebijakan publik juga mengatakan bahwa adanya kebijakan yang terdiri dari beberapa dimensi yaitu: a) monitoring kebijakan, b) evaluasi kebijakan, c) penghargaan (hukuman) kebijakan.²¹

²⁰ Abdullah Ramdhani, Muhammad Ali Ramdhani, *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*, Jurnal Publik, Vol.11; No.01; 2017. Hml. 3-4

²¹ Ibid., hlm 9

2.3. Teori Evaluasi Kebijakan

2.3.1. Pengertian Evaluasi

Evaluasi kebijakan publik merupakan komponen atau tahap akhir dari kebijakan publik, yang berarti kebijakan publik tidak hanya dapat terhambat begitu saja, melainkan harus dilihat dalam suatu mekanisme pemeriksaan yang tercatat sebagai “evaluasi kebijakan”. Evaluasi kebijakan itu sendiri dilaksanakan untuk melihat sejauh mana keberhasilan kebijakan publik guna untuk mempertanggungjawabkan terhadap komponennya. Selain itu, evaluasi diperlukan untuk menilai ketimpangan antara harapan dan kenyataan serta untuk mencari kekurangan sekaligus untuk menutup kekurangan. Evaluasi merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan membuahkan hasil yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan target kebijakan yang ditentukan.²² Tujuan dari evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai pertimbangan dalam peninjauan dan peningkatan pelaksanaan kebijakan pada masa yang mendatang.²³

Menurut Ralph Tyler, evaluasi mendefinisikan sebagai suatu program dalam proses penentuan apakah tujuannya telah tercapai. Sedangkan Cronbach dan Stufflebeam mengatakan evaluasi program adalah upaya menyampaikan informasi untuk menentukan apa yang dilakukan secara teratur terhadap nilai, tujuan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Proses pengambilan keputusan itu didasarkan

²² Ratih Anggraeni, Soesilo Zauhar, Siswidiyanto, Evaluasi Kebijakan Publik, Jurnal Administrasi Publik, Volume 1, Nomor. 1.

²³ Ibid., hlm 48-49

atau dilakukan secara hati-hati terhadap data yang telah dilakukan pengamatan dengan menggunakan standar tertentu yang telah ditentukan.²⁴

2.3.2. Pendekatan Evaluasi

Dalam hal ini perkembangan terhadap evaluasi kebijakan menggunakan beberapa pendekatan-pendekatan seperti yang diungkapkan oleh William Dunn pendekatan-pendekatan tersebut antara lain evaluasi semu, evaluasi formal dan evaluasi teoritis keputusan. Berikut adalah beberapa pendekatan yang ada yaitu:

1. Evaluasi Semu

Evaluasi semu ialah evaluasi yang memerlukan cara-cara yang naratif untuk menghasilkan informasi yang nyata dan mampu mendapatkan hasil kebijakan tanpa berjuang dalam menanyakan tentang keuntungan atau nilai dari hasil-hasil yang ada terhadap individu, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan.

2. Evaluasi Formal

Evaluasi formal ialah evaluasi yang memerlukan cara-cara deskriptif untuk mendapatkan penjelasan yang nyata dan cepat untuk kepercayaan mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasikan hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijaksanaan yang telah diumumkan secara resmi oleh pembuat kebijakan dan pengurus program.

²⁴ Muh Firyal Akbar, Studi Evaluasi Kebijakan, (Gorontalo: Ideas Publishing), Tahun 2018, hlm 15-16

3. Evaluasi Keputusan Teoritis

Evaluasi keputusan teoritis adalah pendekatan dengan memakai metode-metode deskriptif untuk mendapatkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan.

2.3.3. Jenis dan Pelaksanaan Evaluasi

Kewenangan pelaksanaan kebijakan memerlukan keikutsertaan stakeholder secara kemasyarakatan dan keterlibatan masyarakat. Stakeholder dan pemangku kebijakan harus terus menerus terlibat dalam pembicaraan untuk menganalisis hasil dari penerapan kebijakan. Model Helmut Wollman mengatakan evaluasi penerapan kebijakan ada 3 tahap yaitu:

a. Evaluasi Tahap Perencanaan (*Ex-Ante*)

Evaluasi ex-ante adalah evaluasi kebijakan yang dilaksanakan sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan dengan tujuan untuk melihat dan menemukan skala prioritas dari berbagai pemilihan dan peluang dalam mencapai tujuan yang telah di selesaikan sebelumnya.

b. Evaluasi Tahap Pelaksanaan (*On-Going*)

Evaluasi on-going yaitu evaluasi yang dilaksanakan pada saat suatu kebijakan menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan kebijakan dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

c. Evaluasi Tahap Pasca-Pelaksanaan (*Ex-Post*)

Ex-post evaluation adalah model evaluasi yang dilaksanakan pada masa lampau dari evaluasi pelaksanaan kebijakan. Evaluasi ex-post adalah evaluasi

yang dilaksanakan setelah pelaksanaan kebijakan yang berakhir yang ditujukan untuk menganalisa tingkat pencapaian pelaksanaan kebijakan.²⁵

2.3.4. Kriteria Evaluasi

William N. Dunn mengatakan istilah penilaian kebijakan dapat dilaksanakan dengan suatu penafsiran, mengevaluasi dan menghubungkan. Dalam hal ini evaluasi mengenai nilai dan manfaat suatu hasil kebijakan, artinya dalam evaluasi kebijakan harus memberikan informasi yang jelas dan dapat dipercaya mengenai kinerja suatu kebijakan. Menurut William N. Dunn ada 6 kriteria evaluasi kebijakan yaitu sebagai berikut:

a. Efektivitas

William N. Dunn mengatakan bahwa efektivitas mengacu pada kemampuan suatu kebijakan untuk memperoleh hasil yang diinginkan atau untuk memperoleh tujuan yang diambil dalam sebuah tindakan.

b. Efisiensi

William N. Dunn berpendapat bahwa efisiensi berkaitan dengan jumlah tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi seringkali ditentukan oleh tindakan yang diambil.

c. Kecukupan

William N. Dunn mengatakan bahwa kecukupan berkaitan dengan seberapa efektif suatu masalah yang ditemukan, dinilai, atau sebuah peluang yang dilakukan.

²⁵ Ibid., hml.8

d. Responsifitas

Menurut William N. Dunn responsivitas mengacu pada sejauh mana suatu program bias menguntungkan dalam kepentingan atau nilai kelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan suatu kebijakan bias dilihat dari respon masyarakat terhadap pelaksanaannya.

e. Ketepatan

William N. Dunn mengatakan bahwa ketepatan adalah kelayakan yang digunakan untuk memilih sejumlah kebijakan yang akan digunakan sebagai isyarat untuk menilai apakah hasil yang ada mencapai tujuan yang dapat dicapai.²⁶

2.4. Konsep Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

2.4.1. Pengertian Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ialah sesuatu yang membentuk sebuah sistem yang unggul untuk penanganan permukiman kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program untuk mengedepankan partisipasi masyarakat. KOTAKU diharapkan menjadi platform kolaborasi yang mendukung untuk tercapainya penanganan permukiman kumuh yang dilakukan secara bertahap diseluruh daerah-daerah yang dilaksanakan program KOTAKU melalui pengembangan kapasitas pemerintah dan masyarakat.²⁷

²⁶ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada), Edisi kedua, hlm 612

²⁷ Peraturan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Berdasarkan UU No 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, dijelaskan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat sedangkan perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.²⁸

2.4.2. Karakteristik Permukiman Kumuh

Karakteristik perumahan kumuh merupakan salah satu fenomena perumahan permukiman yang menemukan pengurangankualitas dan kondisi bangunan yang memiliki kepadatan tinggi, tidak teratur dan tidak memiliki syarat (batasan sarana dan prasarana ditetapkan dalam lingkup keciptakaryaan) yaitu jalan ingkungan, drainase lingkungan penyediaan air bersih dan minum, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah dan proteksi kebakaran. Karakteristik tersebut selanjutnya menjadi dasar perumusan kriteria dan indikator dalam proses indentifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.²⁹

Peraturan Menteri PUPR No. 14 tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas kawasan permukiman kumuh. Adapun beberapa kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai berikut:

- a. Kondisi bangunan dengan faktor kriteria sebagai berikut

²⁸ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011

²⁹ Dewi Nelly Simanuntak, *Analisis Karakteristik Lingkungan Permukiman Permukiman Kumuh Di Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan*, Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi, Vol. 05 No.01, hlm 11-14

1. Ketidakteraturan bangunan merupakan kondisi bangunan gedung pada permukiman tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam rencana detail tata ruang (RDTR) dan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona.
 2. Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi merupakan yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman.
 - 1) Koefisien dasar bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan RDTR. KDB yaitu angka persentase perbandingan antara luas lahan yang dikuasai
 - 2) Koefisien lantai bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan dalam RDTR. KLB yaitu angka persentase perbandingan antara jumlah seluruh lantai bangunan gedung yang dapat dibangun dengan luas lahan yang dikuasai
 3. Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
- b. Kondisi jalan lingkungan dengan faktor kriteria sebagai berikut
1. Jalan lingkungan tidak melayani permukiman, jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman merupakan kondisi sebagian lingkungan perumahan dan permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan.
 2. Kualitas permukiman jalan lingkungan buruk, merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan.

c. Kondisi drainase lingkungan dengan faktor kriteria sebagai berikut

1. Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dan menjadi kesejangan bagi masyarakat.
2. Ketidakterediaan drainase merupakan kondisi dimana saluran tersier dan saluran lokal tidak tersedia
3. Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan merupakan kondisi dimana saluran lokal tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan
4. Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair didalamnya merupakan kondisi dimana pemeliharaan saluran drainase tidak dilaksanakan baik berupa pemeliharaan rutin atau pemeliharaan berkala
5. Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan.³⁰

d. Kondisi penyediaan air minum dengan faktor kriteria sebagai berikut:

1. Ketidaksediaan akses aman air minum merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak dapat dibangun jaringan perpipaan.

³⁰<https://kotaku.pu.go.id/view/7733/permen-pupr-nomor-28-prt-m-2016-tentang-pedoman-analisis-harga-satuan-pekerjaan-bidang-pekerjaan-umum>

2. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar berlaku merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter
- e. Kondisi pengelolaan limbah dengan faktor kriteria sebagai berikut
1. Sistem pengelolaan limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan dan permukiman tidak memiliki sistem yang memadai yaitu terdiri dari kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individu atau dosmetik, terpusat yang dalam contoh pembangunannya.
 2. Prasarana dan sarana pengelolaan limbah air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis merupakan kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada perumahan dan permukiman dimana kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik atau tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat
- f. Kondisi pengelolaan persampahan dengan faktor kriteria sebagai berikut
1. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis berlaku merupakan kondisi dimana prasarana dan sarana persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memadai sebagai berikut
 - 1) Tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala dosmetik atau rumah tangga
 - 2) Tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan
 - 3) Gerobak sampah atau truk sampah pada skala lingkungan

- 4) Tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan
2. Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis yang merupakan kondisi dimana pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan dan permukiman tidak memenuhi persyaratan.
3. Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase merupakan kondisi dimana pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan tidak dilaksanakan baik berupa pemeliharaan rutin atau pemeliharaan berkala.
- g. Kondisi kebakaran dengan faktor kriteria sebagai berikut
 1. Ketidaksediaan prasarana proteksi kebakaran yang memenuhi persyaratan teknis merupakan kondisi dimana tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran yang meliputi, pasokan air dari sumber alam.
 2. Ketidaksediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang memenuhi persyaratan teknis merupakan kondisi dimana tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran yang meliputi, alat pemadaman kebakaran api ringan (APAR), mobil pompa, mobil tangga sesuai kebutuhan dan peralatan pendukung lainnya.³¹

2.5. Kerangka Berfikir

Berdasarkan bagan di atas bahwa konsep yang akan dijadikan sebagai acuan penelitian terkait tentang evaluasi program KOTAKU di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh bahwa kerangka pemikiran ini

³¹<https://kotaku.pu.go.id/view/7733/permen-pupr-nomor-28-prt-m-2016-tentang-pedoman-analisis-harga-satuan-pekerjaan-bidang-pekerjaan-umum>

berdasarkan hukum yang ada yaitu UU No 1 Tahun 2011 tentang kawasan permukiman kumuh dan adanya keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 422 Tahun 2021 tentang penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh di Kota Banda Aceh. Berdasarkan landasan yang ada peneliti ini yang ingin dilihat bagaimana evaluasi terhadap program KOTAKU di Gampong Seutui kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh yang berlandaskan pada rumusan masalah dan indikator yang telah ditetapkan.

UU Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Kawasan dan Perumahan permukiman serta Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh

Keputusan Wali Kota Banda Aceh Nomor 422 Tahun 2021 tentang penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh di Kota Banda Aceh

Indikator Evaluasi Kebijakan

- a. Efektivitas
- b. Efesiensi
- c. Kecukupan
- d. Responsivitas
- e. Ketepatan

Pendukung dan Penghambat Terhadap Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh

Hasil Yang Ingin Dicapai Penelitian Ini Yaitu Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Gampong Seutui Telah Dilaksanakan Dengan Baik

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Metode penelitian ialah pelaksanaan yang dilakukan secara sistematis dalam sebuah penelitian dimulai dari mencari data, mengolah data, dan menganalisis data secara ilmiah dan hasilnya dapat di pertanggungjawabkan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrument untuk mendapatkan sebuah data secara mendalam dan suatu data yang mengandung makna.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang menciptakan data dan informasi berbentuk deskriptif serta bentuknya berupa kata-kata, gambar dan bukan dalam bentuk angka-angka. Data yang diperoleh melalui perkataan dari informan atau responden. Penelitian deskriptif kualitatif memiliki tujuan menafsirkan serta mendeskripsikan fenomena sosial dengan membandingkan dengan gejala dilapangan.³²

3.2. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang adanya fokus penelitian untuk mengevaluasi tentang program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Adapun dalam hal ini beberapa indikator yang digunakan sebagai berikut:

³² Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), hlm 84.

- a. Evaluasi pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, dengan indikator dibawah ini yaitu:

Tabel 3. 1
Indikator Evaluasi Dalam Peogram KOTAKU

No	Dimensi	Indikator
1	Evaluasi dalam Program KOTAKU menurut William N. Dunn	a. Efektivitas b. Efesiensi c. Kecukupan e. Responsivitas f. Ketepatan

Sumber: William N. Dunn

- b. Faktor pendukung dan faktor penghambat terhadap pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, berdasarkan indikator dibawah ini yaitu:

Tabel 3. 2
Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Program KOTAKU

No	Dimensi	Indikator
1	Faktor pendukung Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	a. Tersedianya Anggaran b. Kerjasama pemerintah dalam penanganan permukiman kumuh c. Adanya website PIM
2	Faktor penghambat Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	a. Kepatan Jumlah Penduduk b. Kurangnya Keterlibatan Masyarakat dalam Penanganan Permukiman Kumuh

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini yaitu di Kantor Camat Gampong Seutui berdekatan dengan Jalan Teuku Umar, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Alasan peneliti memilih tempat ini sebagai objek penelitian karena peneliti menemukan bahwa ditempat ini ada sebuah permasalahan atau fenomena yang sesuai dengan judul yang peneliti angkat selain itu didukung juga dengan data penelitian yang peneliti temukan dilapangan. Penelitian di lokasi tersebut berdasarkan observasi dan pengamatan menetapkan kantor camat seutui sebagai objek penelitian karena sejalan dengan tugas dan kewajiban dimana gampong seutui kecamatan baiturrahman tersebut adalah salah kota atau tempat yang ditetapkan atau dilaksanakan program kota tanpa kumuh (KOTAKU) yang bertugas mengkoordinasi terhadap penyelenggaraan atau tujuan yang ingin dicapai dalam program KOTAKU.

Lokasi kedua yang menjadi objek penelitian yaitu di Kantor KOTAKU Kota Banda Aceh, Jl. Tgk Syech Mudawali No.19F, Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Alasan peneliti menetapkan kantor KOTAKU sebagai tempat peneliti kedua adalah salah satu penggerak pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh dan mengetahui sejauh mana program KOTAKU ini dilaksanakan.

3.4. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan ialah mempengaruhi hasil dari penelitian ini karena dalam penelitian ini banyak menggunakan metode

pengolahan data secara akurat. Jenis data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah informan penelitian yaitu pihak yang menjadi sumber informasi dalam menemukan sebuah variabel yang diteliti³³

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam peneliti maka infroman yang dibutuhkan seperti kepala desa Gampong Seutui, badan keswadayaan masyarakat (BKM), fasilitator KOTAKU, dan masyarakat dalam pelaksanaan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun aspek yang ingin di wawancarai terkait dengan pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yaitu terkait dengan kepadatan bangunan, akses jalan lingkungan, penyediaan air minum, aspek terhadap drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi terhadap kebakaran.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang di dapat dari sumber bacaan dan berbagai sumber pendukung lainnya dari lokasi penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang berupa dokumen, notulen rapat, jurnal, skripsi dan pendukung lainnya.³⁴

³³ Rahmadi, Buku Pengantar Metodologi Penelitian, (Banjarmasin: Antasari Press), Cetakan Pertama 2011, hlm 71

³⁴ Ibid., hlm 72

Pengumpulan data dari instansi tersebut sebagai bahan rujukan untuk mendukung pembahasan studi yang disesuaikan dengan kebutuhan data yang diperlukan agar peneliti dapat digunakan sebagai bahan pelengkap dan pendukung dari data yang ada yang berhubungan dengan masalah penelitian dari data sekunder. Adapun data yang didapat melalui Kantor KOTAKU seperti peraturan perundang-undangan terkait dengan penetapan lokasi permukiman kumuh, data terhadap pembangunan infrastruktur dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

3.5. Informan Penelitian

Pada penelitian kualitatif adanya informan yang di wawancarai secara mendalam yang berkaitan dengan persoalan yang peneliti lakukan dan dibahas dalam penelitian ini. Informan yang dilakukan peneliti di pilih dan ditentukan dengan pertimbangan tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti. Informan tersebut adalah penunjang yang memiliki karakteristik berdasarkan jenis pekerjaan yaitu:

Tabel 3. 3
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah	Keterangan
1	Fasilitator Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	1 Orang	Informan tersebut ialah yang mengetahui secara detail tentang masalah penelitian yang akan diperoleh dalam pelaksanaan kota tanpa kumuh, dan peneliti dapat

			mengolah data terhadap informasi yang didapatkan dari informan tersebut.
2	Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Seutui	1 Orang	Informan tersebut ialah yang mengatur pelaksanaan program KOTAKU di Gampong Seutui dan mengaktualisasi ide-ide masyarakat terkait pelaksanaan program KOTAKU.
3	Kepala Desa	1 Orang	Informan tersebut dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian.
4	Masyarakat	5 Orang	Masyarakat dipilih karena adanya informasi tambahan yang tidak didapatkan pada informan sebelumnya yang mengetahui dan merasakan terhadap pelaksanaan program kota tanpa kumuh (KOTAKU).

Sumber: Diolah oleh peneliti tahun 2023

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah aktivitas yang dilaksanakan guna mendapatkan informasi yang diperlukan dalam rangka untuk mencapai tujuan dari suatu penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu:

1. Wawancara

Teknik wawancara adalah yang dilakukan secara mendalam atau semi terstruktur, yaitu pewawancara yang mengarah pada pembicaraan dan mengajukan pertanyaan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan.³⁵ Wawancara dilakukan dengan informan fasilitator KOTAKU, badan keswadayaan masyarakat, kepala desa, masyarakat, dengan topik dan menggunakan sikap sopan kepada informan dalam menentukan arah pembicaraan, wawancara ini dilakukan dengan cara bertanya secara langsung (*face to face*) kepada masyarakat dan pemerintah terkait dengan pelaksanaan program kota tanpa kumuh (KOTAKU).

2. Observasi

Observasi proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai masalah yang diteliti terkait dengan tingkah laku yang dilakukan oleh individu atau kelompok secara langsung.³⁶ Teknik observasi yang peneliti gunakan adalah pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai pembangunan terhadap bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan pada pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.

³⁵ Fadhallah, Wawancara, (Jakarta Timur: UNJ Press, 2021), hlm 8

³⁶ Rahmadi, Buku Pengantar Metodologi Penelitian, (Banjarmasin: Antasari Press), Cetakan Pertama 2011, hlm 80

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data pada tempat penelitian, yang meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto mengenai kegiatan yang dilakukan secara relevan. Dokumentasi ini menggunakan kamera handphone sebagai alat dalam pengambilan data dan gambar selama penelitian berlangsung.

3.7. Teknik Analisis Data

Menurut Noeng Muhadjir analisis data ialah sebagai upaya mencari dan menemukan secara sistematis catatan observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.

Adapun di bawah ini merupakan beberapa langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses mencari, menemukan, mencatat serta mengumpulkan semua data secara objektif yang dilakukan dengan hasil observasi dan wawancara ketika peneliti turun langsung ke lapangan yaitu pencatatan data dari berbagai bentuk data yang ada di lapangan.

2) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. Dan dalam proses ini peneliti

mencari data yang benar-benar valid sehingga bisa menguji kebenaran atas data yang diberikan.

3) Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada tahap ini adanya penggabungan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat yang terjadi terhadap program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

4) Pengambilan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan ialah suatu kegiatan yang dapat di olah terhadap kesimpulan-kesimpulan selama penelitian berlangsung.³⁷ Pada tahap pengambilan kesimpulan di lakukan secara efektif yang berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, teori, dan hasil dari wawancara yang didapatkan dari hasil kebenarannya dalam mengolah data.

³⁷ Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hlm 209-210.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Letak Geografi Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh merupakan ibu Kota Provinsi Aceh, Indonesia. Kota Banda Aceh berfungsi sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, politik, sosial dan budaya. Kota Banda Aceh ialah Kota serambi mekkah yang paling tua di Asia Tenggara, dimana Kota Banda Aceh adalah ibu Kota dari kesultanan Aceh. Sejarah Kota Banda Aceh dikenal sebagai Kota tua yang erat kaitanya dengan sejarah gemilang kerajaan Aceh Darussalam. Di masa kesultanan, Banda Aceh di kenal sebagai Bandar Aceh Darussalam. Kota ini dibangun oleh sultan Johan Syah pada hari jumat, tanggal 1 Ramadhan 601 H (22 April 1205 M).

Letak geografis Kota Banda Aceh secara astronomi berada di belahan bumi bagian utara. Titik koordinat Kota Banda Aceh Berada diantara $05^{\circ}16'15''$ – $05^{\circ}36'16''$ lintang utara dan $95^{\circ}16'15''$ – $95^{\circ}22'35''$ bujur timur. Ketinggian terendah pada wilayah Kota Banda Aceh adalah 0.45 meter dibawah permukaan laut, sedangkan ketinggian tertingginya adalah 1 meter diatas permukaan laut. Sementara ketinggian rata-rata di wilayah Kota Banda Aceh adalah 0.80 meter diatas permukaan laut. Kota Banda Aceh berbatasan dengan beberapa wilayah yaitu, bagian utara berbatasan dengan selat malaka, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar, bagian barat berbatasan dengan Samudra hindia.

Kota Banda Aceh terdiri dari 9 Kecamatan dan 90 Gampong dan Kecamatan:

Tabel 4. 1
Daftar Jumlah Kecamatan, Gampong dan Luas Wilayah Kota Banda Aceh

No	Kecamatan	Jumlah Gampong	Luas Wilayah
1	Baiturrahman	10	455 Km ²
2	Kuata Alam	11	1.005 Km ²
3	Meuraxa	16	726 Km ²
4	Syah Kuala	10	1.424 Km ²
5	Leung Bata	9	534 Km ²
6	Kuta Raja	6	521 Km ²
7	Banda Raya	10	479 Km ²
8	Jaya Baru	9	378 Km ²
9	Ulee Kareng	9	615 Km ²

Berdasarkan stasiun klimatologi, rata-rata temperature Kota Banda Aceh memiliki suhu udara bulanan berkisar antara 25,5° C hingga 27,5° C dengan kisaran antara 18,0° C sampai 37,0° C. sedangkan tekanan udaranya diantara 108-102 milibar. Curah hujan Banda Aceh pertahun berkisar antara 1.039 mm- 1.907 mm, dengan curah hujan rata-rata pertahun 1.592 mm.

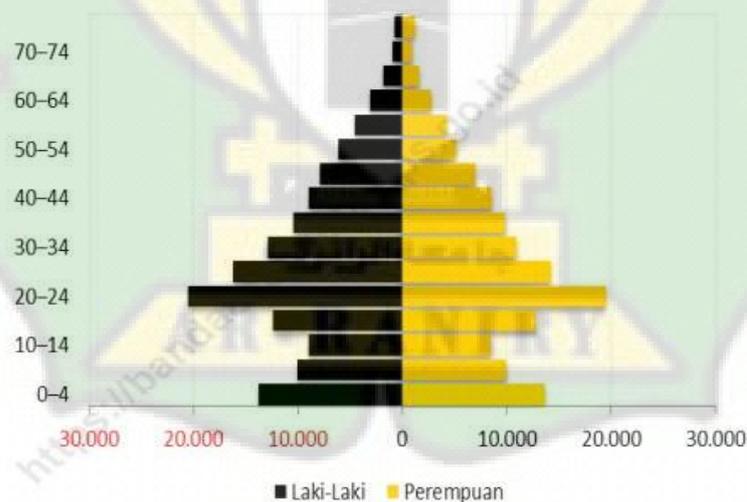


Gambar 4. 1 Peta Kota Banda Aceh
Sumber: Kota Banda Aceh Dalam Angka 2020

A. Jumlah Penduduk

Data jumlah penduduk yang ada di Kota Banda Aceh yaitu sebesar 270.321 jiwa. Penduduk laki-laki sebanyak 138.993 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 131,328 jiwa kecamatan Kuta Alam mempunyai mempunyai jumlah penduduk yang paling besar yaitu 53.679 jiwa, kemudian kecamatan Syiah Kuala 38.682 jiwa dan Kecamatan Baiturrahman 38.192 jiwa. Penduduk laki-laki di Kota Banda Aceh lebih banyak dari penduduk perempuan, hal ini ditunjukkan oleh sex rasio yaitu setiap 100 penduduk perempuan terdapat 106 penduduk laki-laki. Jumlah penduduk asing berdasarkan izin tinggal terbatas di Kota Banda Aceh 2019 yaitu 410 orang. Penduduk asing terbanyak berasal dari warga negara lain.³⁸

Untuk melihat secara terperinci jumlah jenis kelamin laki-laki dan perempuan berdasarkan umur dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4. 2 Jumlah Kelamin dan Umur

Sumber: Perkim Kota Banda Aceh

³⁸ <https://perkim.id/profil-pkp/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-kota-banda-aceh/>

B. Visi Misi Kota Banda Aceh

Adapun visi misi Kota Banda Aceh yaitu:

1. Visi

“Terwujudnya Kota Banda Aceh yang gemilang dalam bingkai syariah”

2. Misi

- a. Meningkatkan pelaksanaan syariat islam dalam bidang penguatan Aqidah, akhlak, ibadah, muamalah dan syiar islam
- b. Meningkatkan kualitas Pendidikan kebudayaan, kepemudaan dan olahraga
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat
- d. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
- e. Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan yang baik
- f. Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
- g. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.³⁹

4.1.2. Gambaran Umum Gampong Seutui

Gampong Seutui merupakan salah satu gampong dari 10 gampong dalam kecamatan Baiturrahman, secara administratif gampong seutui terletak di wilayah kecamatan Baiturrahman dengan luas wilayah 26, 91 Ha dibagi lima dusun yaitu dusun kulu, dusun kelinci, dusun glee gurah sibanyak dan dusun seulawah. Dimana lokasi gampong berada di pusat Kota dengan jarak tempuh + 1 Km.

³⁹ <https://dishub.bandaacehkota.go.id/page-visi-dan-misi-walikota.html>



Gambar 4. 3 Peta Gampong Seutui

Sumber: Dokumen NSUP Kotaku Profil Gampong Seutui

- Sebelah Utara : Gampong Sukaramai
 Sebelah Selatan : Gampong Lamlagang
 Sebelah Barat : Gampong Lamteumen Timur
 Sebelah Timur : Gampong Neusu Aceh

Berdasarkan hasil servey, dapat diketahui bahwa melalui perencanaan ter up date informasi jumlah penduduk gampong seutui 2.491 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki sebesar 1.064 jiwa dan perempuan 1.427 jiwa. Maka kepadatan penduduk yang tergolong rendah dengan besaran 29.57 jiwa/ Ha. Terdapat 766 jumlah kartu keluarga (KK) di gampong dan 544 kepala rumah tangga.

Kawasan seutui selain merubah fungsi yang dulunya kawasan kumuh sekarang menjadi ruang terbuka publik yang dapat difungsikan untuk beraktivitas masyarakat sebagai tempat berolahraga, tari seni dan tempat permainan anak. Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) telah selesai melakukan penataan kumuh di kawasan krueng daroy yang mewujudkan impian masyarakat untuk kawasan permukiman yang berorientasi dalam penanganan

pada kawasan tepian sungai yang merupakan salah satu identitas Kota Banda Aceh. Dalam hal ini juga meningkatkan kondisi sosial masyarakat setempat dengan menciptakan area wisata tepian sungai yang terdiri dari jalur pedestrian dengan sarana dan prasaranan pendukung lainnya.

Berikut adalah gambar pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang ada di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh sebagai berikut:

Sebelum



Sesudah



Gambar 4. 4 Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Program KOTAKU

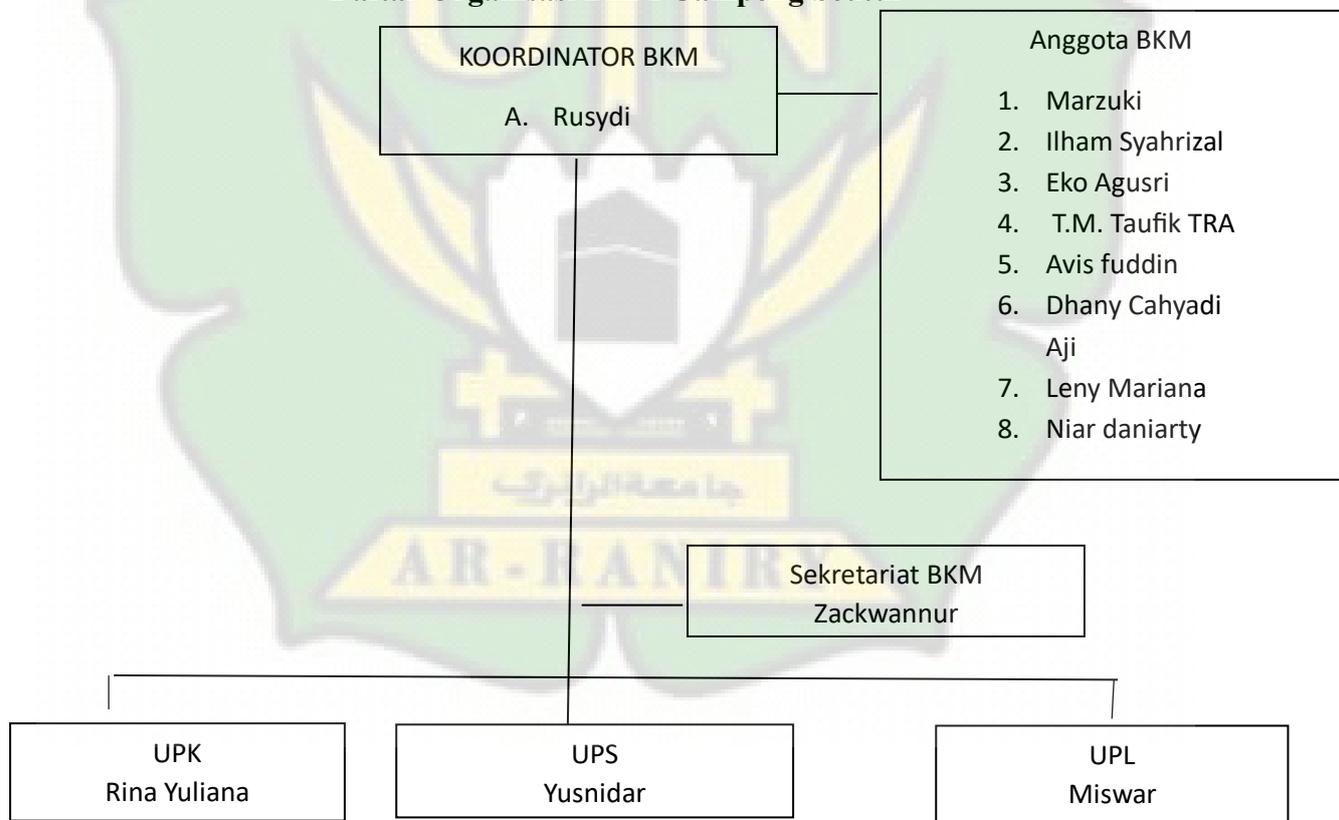
Dilaksanakannya program Kotaku ini adanya yang mengelola maka dari itu terbentuknya struktur lembaga BKM di setiap daerah ini sendiri yang sudah

dikuatkan melalui dokumen dan ditetapkan dari kelembagaan hukum dimana terdiri dari satu koordinator dan 8 anggota yang kesemuanya terpilih melalui pemilu BKM tingkat dusun hingga tingkat gampong.

Adapun aktor-aktor yang terlibat dalam pembentukan struktur badan keswadayaan masyarakat (BKM) di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Struktur jabatan BKM Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Baiturrahman Kota Banda Aceh

Tabel 4. 2
Daftar Organisasi BKM Gampong Seutui



Sumber: dokumen NSUP Kotaku Profil Gampong Seutui

2. Visi Misi BKM Gampong Seutui

Adapun Visi Misi Badan Keswadayaan masyarakat (BKM) Gampong Seutui

1. Visi BKM

“Mewujudkan Permukiman yang aman, sehat ceras, berdaya saing, berbudayan dan berakhlak mulia

2. Misi BKM

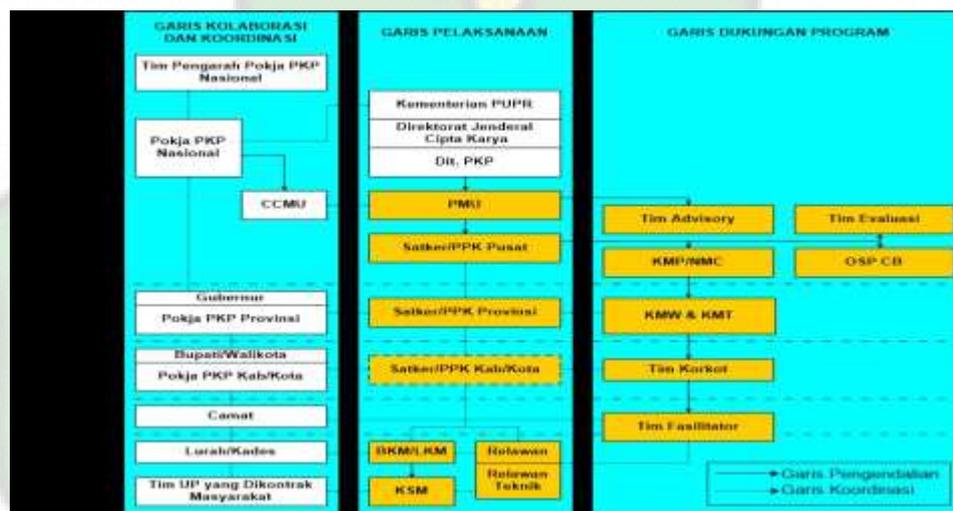
1. Mewujudkan kenyamanan dan ketertiban didalam permukiman masyarakat
2. Meningkatkan kesehatan dan kebersihan gampong
3. Meningkatkan kegiatan yang berlandasan keimanan dan kerukunan beragama
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuka lapangan kerja serta peningkatan skill
5. Meningkatkan sarana dan prasarana dari segi infrastruktur, ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

4.1.3. Gambaran Umum Kantor KOTAKU

Kantor KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) berada di pusat Kota Banda Aceh yang tepatnya berada di Jl. Tgk. Syech Mudawali No. 19F, Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Kantor KOTAKU merupakan tempat untuk mengumpulkan seluruh data terkait tentang pelaksanaan program KOTAKU di Kota Banda Aceh. Tim Kantor KOTAKU ini bertugas melakukan terhadap pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang dilakukan dari

tahap pendataan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, keberlanjutan, dan evaluasi. Program KOTAKU ini di rancang untuk melakukan berbagai permasalahan yang terjadi terhadap permukiman kumuh yang di laksanakan oleh Kantor KOTAKU.

Adapun aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program KOTAKU yaitu:



Gambar 4. 5 Struktur Organisasi KOTAKU

Sumber: Kantor KOTAKU Kota Banda Aceh

4.2. Pembahasan

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) salah satu program yang diarahkan untuk menangani permasalahan permukiman kumuh, melalui peningkatan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman perkotaan. Program ini memiliki target penanganan seluas 23.656 hektar dari 38.431 hektar yang menjadidi target nasional, peningkatan kualitas infrastruktur permukiman di lakukan melalui pendekatan skala lingkungan dan skala kawasan yang dilakukan pada 94 Kota prioritas, salah satunya di Kota Banda Aceh.

Penanganan permukiman kumuh memiliki kompleksitas permasalahan dan tidak dapat dilaksanakan secara parsial sehingga penanganan harus terpadu dan terintegritasi. Dasar pengelompokan kawasan permukiman kumuh antara lain yaitu, kompleksitas permasalahan, kedekatan lokasi, kemiripan tipologi, arah kebijakan pengembangan Kota. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, khususnya tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Kota Banda Aceh merupakan salah satu daerah pemerintah yang terletak di wilayah Kota Banda Aceh Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan program yang direalisasikan oleh pemerintah Kota Banda Aceh Nomor 372 Tahun 2014 tentang penetapan lokasi perumahan permukiman kumuh Kota Banda Aceh, menetapkan luasan kumuh sebesar 797.60 Ha. Terdapat 20 kawasan yang terletak 34 gampong di 11 kecamatan.

Rencana aksi penanganan permukiman kumuh Kota Banda Aceh di tuangkan dalam pelaksanaan program rencana kawasan permukiman kumuh perkotaan (RKPKP), diantaranya rencana penataan kawasan prioritas yaitu kawasan kumuh seutui dengan luas 32,99 hektar yang akan dilaksanakan di tahun 2018-2019. Lingkup kawasan yang ditata adalah 32,99 Ha meliputi 6 Gampong Yaitu, 4 Gampong di Kecamatan Baiturrahman (Neusu Jaya, Neusu Aceh, Sukaramai, dan Seutui) dan 2 Gampong di Kecamatan Banda Raya (Lamlang dan Geuce Kayee Jato).

Gampong seutui merupakan salah daerah yang ditetapkan sebagai permukiman kumuh dimana banyak terjadi lahan yang ditempati oleh masyarakat itu sangat kumuh sebelum masuknya program KOTAKU. Dapat dilihat juga dari hasil yang ada seberapa banyak jumlah perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ada di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh paa table berikut ini.

Tabel 4. 3
Jumlah Gampong, Dusun, Luas Administrasi Negara

No	Gampong	Nama Dusun	Luas Administrasi (Ha)	Luas Kumuh SK (Ha)	Luas Kumuh Flag-1 (Ha)
1	Lamlagang	Satu	11,15	0,66	0,66
2	Neusu Jaya	Bahagia	2,55	2,53	2,53
		Mulia	3,46	3,46	3,46
3	Seutui	Glee Gurah	8,37	4,90	4,90
		Keurinci	3,43	1,95	1,95
		Kulu	5,10	5,10	5,10
		Seulawah	5,55	4,71	4,71
		Sibayak	7,69	3,78	3,78
4	Sukaramai	Gureutee	7,35	2,50	2,50
		Keumala	4,57	1,74	1,74
		Singgalang	8,79	0,39	0,39
5	Neusu Aceh	H. Nyak Syam	4,20	1,27	0,00
Total			72,21	32,99	31,72

Sumber: SK Walikota Banda Aceh No. 372 Tahun 2014

Berikut adalah gambar letak lokasi permukiman kumuh yang ada di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:



Gambar 4. 6 Peta Kawasan Permukiman Kumuh

Sumber: Lampiran SK Kumuh 2021

Dalam hal ini dapat di lihat bahwa Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh adalah Gampong yang terletak di tengah-tengah pusat Kota Banda Aceh yang di kelilingin oleh beberapa Gampong lainnya dan Gampong Seutui termaksud kedalam permukiman kumuh dan perumahan kumuh dengan hal itu Gampong Seutui dilaksanakannya program kota tanpa kumuh (KOTAKU) tersebut.

4.2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.

Evaluasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan program yang di laksanakan oleh pemerintah Kota Banda Aceh berdasarkan Keputusan Wali Kota Banda Aceh Nomor 372 Tahun 2014 tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Banda Aceh. Dengan ditetapkannya keputusan walikota Banda Aceh terhadap penetapan lokasi kawasan kumuh ini maka bisa membantu masyarakat agar tidak terjadinya permukiman kumuh dan membantu sektor perekonomian masyarakat Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman.

Evaluasi dalam program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) mempunyai peranan dalam menentukan keberhasilan suatu program yang dilaksanakan dalam penelitian ini, peneliti berfokus untuk mengevaluasi dalam pelaksanaan program KOTAKU di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Dalam hal ini peneliti mengetahui bahwa evaluasi program tersebut peneliti menggunakan teori William N. Dunn sebagai indikator dalam menyelesaikan permasalahan. Adapun indikator yang digunakan sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu kegiatan yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu upaya dalam mengevaluasi suatu program dapat dilihat dari keefektivitasannya. Indikator ini adalah salah faktor pendukung untuk menemukan bagaimana dalam tahap pelaksanaan program ini apakah perlu adanya sebuah perubahan yang telah ditetapkan secara keseluruhan.

Adapun hasil evaluasi menurut indikator keefektivitasan dalam kriteria program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah sebagai berikut:

Pembangunan sarana dan prasarana yang sudah memadai, sebelum terlaksanakan program Kotaku aspek kondisi bangunan yang tidak teratur, jarak antara rumah berdekatan, dan tidak sesuai dengan ketentuan desa yang meliputi peruntukan, perletakan yang tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas, dan konsep identitas dan orientasi lingkungan.

Terkait dengan wawancara yang peneliti lakukan bersama keuchik Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh ialah:

“Sebagai keuchik Gampong Seutui berharap Gampong ini bisa menghilangkan kumuh dimana keuchik gampong dan pemerintah Kota Banda Aceh melaksanakan program KOTAKU. Sebelum pelaksanaan ini keuchik gampong melakukan sosialisasi dengan masyarakat terkait dengan pembangunan. Pada saat pelaksanaan program ini ada beberapa rumah masyarakat yang digusur terkait dengan pelaksanaan ini karena mereka menepatnya di tanah pemerintah. keucik Gampong Seutui melakukan penggusuran tetapi dilakukannya bukan dengan kekejaman tetapi dengan meditasi, pendekatan, rapat secara agama dan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar bisa menerima dan diberikan konferensi oleh pemerintah Kota Banda Aceh senilai 15 Juta untuk pemindahan tempat yang diberikan setiap satu rumah.”⁴⁰

Berikut adalah gambar sebelum dan sebelum terlaksanakannya program Kotaku banyak rumah warga yang belum tertata dengan rapi yang mengakibatkan permukiman kumuh.



Gambar 4. 7 Kondisi Bangunan
Sumber: Penataan Kawasan Seutui Tahun 2018

Maka dari hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa aspek kondisi bangunan saat ini sudah baik dengan adanya program KOTAKU dan membantu masyarakat terhadap pelaksanaan yang dibangun oleh pemerintah, dan kawasan permukiman kumuh pun sudah tertata dengan baik walaupun kawasan

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak T. Amiruddin, Kepala Desa Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 23 Juni 2023

kumuhnya susah dihilangkan secara tuntas karena tanah rata-rata masih tidak terprogram.

Dan hal ini juga adanya akses jalan lingkungan yang kurang baik sebelum dilaksanakan program Kotaku ini proteksi terhadap jalan lingkungan masih belum memadai, akses terhadap jalan lingkungan dan kualitasnya masih buruk yang menyebabkan berbagai kendala yang dihadapi masyarakat sekitar.

Terkait dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan kepala desa Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

“Sebagai keuchik Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh terkait dengan pelaksanaan program kota tanpa kumuh ini menjadi sebuah solusi dalam penanganan kumuh yang ada di Gampong Seutui terhadap pelaksanaan dan pembangunan jalan, dan jalan tersebut kalau kita masuk ke dalam lingkungan atau lorong-lorong kecil jalannya 1.5 meter ada yang 1 meter yang tidak bisa di lalui kendaraan roda empat kecuali becak. Jalan lingkungan ini dikerjakan oleh masyarakat melalui badan keswadayaan masyarakat (BKM) yang dibantu oleh tukang-tukang lokal.”⁴¹

Berikut adalah gambar jalan lingkungan yang telah di perbaiki yang bertujuan untuk kenyamanan masyarakat sekitar dan tidak ada lagi kawasan kumuh yang terjadi di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.

⁴¹ Hasil Wawancara dengan bapak T. Amiruddin Selaku Kepala Desa Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 23 Juni 2023.



Gambar 4. 8 Jalan Lingkungan
Sumber: Profil BKM Gampong Seutui

Dengan demikian hasil akses jalan lingkungan yang telah dilaksanakan sekarang sudah memadai dan bisa digunakan oleh masyarakat sekitar.

Sehingga adanya alokasi akses terhadap air minum yang terpenuhi, sebelum dilaksanakan program Kotaku ini penyediaan air minum tidak dapat ketersediaan akses air minum yang aman pada lokasi permukiman kumuh.

Terkait dengan hasil wawancara peneliti lakukan dengan masyarakat Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

“Air bersih ini ialah suatu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia untuk keperluan yang sangat penting. Untuk kemanfaatan bagi keperluan rumah tangga maupun kegiatan-kegiatan yang memerlukan dan membutuhkan sumber air.”⁴²

Dari hasil yang didapatkan masyarakat Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman setelah berjalannya dan adanya perbaikan terhadap akses air minum dan sebagian kebutuhannya sudah terpenuhi dalam pelaksanaan pembuatan sarana dan prasarana yang dibuat seperti PDAM dengan sistem perpipaan yang

⁴² Hasil Wawancara dengan Masyarakat Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 25 Juni 2023.

terhubung yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan sekarang sudah memiliki kualitas air minum yang tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa.

Dalam hal ini adanya pembuatan drainase lingkungan yang disebabkan dengan berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan kawasan Seutui terhadap buruknya kualitas jaringan drainase yang sering menyebabkan genangan atau banjir.

Terkait dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Masyarakat Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

“Terhadap pembuatan drainase lingkungan ini banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat dan membantu masyarakat agar tiak terjadinya lagi banjir yang sering terjadi pada dataran rendah permukiman dan setelah dibangun sarana ini sangat membantu masyarakat dan air pun sudah dapat mengalir dengan baik.”⁴³

Sebelum



Sesudah



Gambar 4. 9 Drainase Lingkungan
Sumber: Penataan Kawasan Seutui Tahun 2018

⁴³ Hasil Wawancara dengan masyarakat Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 25 Juni 2023.

Dari hasil yang didapatkan terhadap pembangunan drainase ini bisa membantu masyarakat sekitar dalam mengatasi banjir karena faktor hujan, dan air mengalir sudah membaik yang dialirkan ke septik yang telah dibangun.

Terhadap pengelolaan air limbah yang terjadi sebelum terlaksanakan program Kotaku ini tidak membahayakan bagi warga sekitar karena limbah yang dituangkan merupakan limbah rumah tangga dan sebelum pelaksanaan ini akses terhadap pembangunan belum memadai.

Terkait dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan masyarakat Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

“Pembangunan Kotaku ini sangat efektif dan tidak sia-sia tetapi jangan menyempingkan terhadap sumber daya alam jika terjadinya suatu permasalahan. Maka dari itu terhadap pengelolaan air limbah ini masyarakat bisa menjaganya.”⁴⁴

Berdasarkan hasil yang ada terhadap pengelolaan air limbah ini sudah memadai setelah pelaksanaan program Kotaku yang membantu masyarakat sekitar agar tidak terjadinya lagi permukiman kumuh baru.

Adanya pengelolaan persampahan, sarana dan prasarana yang dilakukan sudah berjalan dan akses terhadap pengelolaan persampahan yang dilakukan kurang baik yang mengakibatkan terjadinya permukiman kumuh.

Terkait dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan masyarakat Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Masyarakat Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 25 Juni 2023

“Terkait dengan kondisi persampahan yang terjadi adanya tukang ambil sampah setiap per tiga hari dalam seminggu dan masyarakat membayar uang pengangkutan sampah 10.000 perbulan pada satu rumah. Tetapi Cuma barang tertentu saja yang mau diangkut seperti daun, limbah rumah tangga, plastik dan botol. Dan ada juga yang tidak mau diangkat seperti kayu-kayu besar, triplek dan ada protes dari masyarakat jangan uangnya saja yang dikutip setiap bulan tapi tidak mau menangkat sampah, kecuali limbah busuk dan hal tersebut menjadi kerugian bagi masyarakat.”⁴⁵

Setelah di laksanakan program Kotaku ini bisa membantu masyarakat sekitar agar tidak terjadinya lagi kawasan permukiman kumuh baru dan masyarakat dapat menjaga fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah kepada Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.

Proteksi kebakaran, dalam menangani dan mengatasi permasalahan terhadap kebakaran yang terjadi kurangnya ketersediaan prasarana terhadap proteksi kebakaran yang bisa menjadi kendala bagi masyarakat sekitar.

Terkait dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan kepala desa Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

“Akses masuk jalan susah dilewati mobil besar dan hal tersebut menjadi kendala bagi masyarakat sekitar karena akses jalan yang didapatkan kurang memadai walaupun sudah dilaksanakannya Kotaku ini. Maka dari itu perlunya kesadaran masyarakat agar menyediakan alat pemadam kebakaran jika terjadi hal diluar kendali yang akan terjadi, tapi mudah-mudahan tidak terjadinya yang bisa menyebabkan ketimpangan bagi masyarakat.”⁴⁶

Berdasarkan hasil yang ada terkait dengan proteksi kebakaran belum tersedianya sarana dan prasarana tersebut seperti alat pemadam api ringan.

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Masyarakat Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 24 Juni 2023.

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak T. Amiruddin selaku Kepala Desa Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 23 Juni 2023.

2. Efisiensi

Efisiensi adalah cara untuk mendapatkan suatu tujuan yang telah ditetapkan untuk mendapatkan sumber daya yang dikeluarkan. Sumber daya yang dimaksud adalah tenaga, uang, maupun waktu. Kotaku ini di laksanakan untuk mengatasi permukiman kumuh yang terjadi di daerah-daerah permukiman dan menjadi permukiman yang layak huni.

Adapun hasil evaluasi menurut indikator efisiensi dalam kriteria program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah sebagai berikut:

Dalam aspek bangunan gedung ini sebelum terlaksanakan program Kotaku terlihat kurang efisien karena terdapat kepadatan penduduk yang terjadi dan tidak sesuai dengan teknik lingkungan dan tidak terstrukturnya pembangunan yang telah ada. Dan tingkat kepadatan pada setiap rumah sangat berdekatan yang mengakibatkan permukiman Gampong Seutui tidak tertata dengan baik.

Terkait dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan masyarakat Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut.

“Adanya Sebagian perobohan rumah warga untuk pembangunan infrastruktur tersebut karena adanya rumah warga yang ditempati kenak tanah negara tetapi setelah dilakukan pengrobohan dan penggusuran maka adanya anggaran yang diberikan oleh pemerintah sebanyak 150 Juta perrumah untuk pembangunan rumah yang akan ditempati selanjutnya.”⁴⁷

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Masyarakat Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 24 Juni 2023.

Terlaksananya program Kotaku ini sangat membantu masyarakat dalam penataan bangunan di kawasan permukiman kumuh agar lebih baik dan terstruktur.

Dan juga terhadap indikator jalan lingkungan, terdapat permukaan jalan yang fasilitasnya tidak aman dan kurang nyaman dan tidak dapat dilalui kendaraan karena pembentukan jalan yang tidak memadai.

Terkait dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan masyarakat Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman adalah sebagai berikut

“Setelah pelaksanaan Kotaku ini Gampong Seutui sudah baik dan masyarakat sangat membantu dan akses jalan pun sudah bisa kita lalui dulu sebelum adanya kotaku ini susah untuk kita lewati di belakang-belakang rumah karena sangat kumuh atau kotor. Tapi dengan adanya ini dan pihak keuchik pun memberikan anggaran agar gampong ini ditata dengan baik dan nyaman.”⁴⁸

Tapi setelah pelaksanaan program Kotaku ini adanya anggaran yang diberikan oleh pemerintah dan adanya pembangunan jalan yang dibuat untuk kenyamanan masyarakat sekitar.

Terhadap aspek drainase lingkungan terdapat 22,45 Ha area rawan banjir jika hujan lebat datang dan sungai krueng daroy melimpah airnya hal ini di karenakan 84,64 % saluran drainase tidak terpelihara dan 7.179,87 meter/ 83,54% drainase telah terjadi kerusakan.

Terkait dengan hasil wawancara yang di lakukan peneliti dengan badan keswadayaan masyarakat (BKM) Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Masyarakat Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 25 Juni 2023.

“Terkait dengan saluran yang dibuat dan dengan anggaran yang diberikan maka adanya pembangunan yang dilaksanakan beberapa item pembangunan yang akan dikerjakan seperti rabat beton, tutup saluran, jalan papin blok, saluran got, dan rabat beton. Hal tersebut untuk memperkecil atau memangkas wilayah-wilayah kumuh.”⁴⁹

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka adanya pembuatan beberapa saluran dapat membantu masyarakat dalam menangani permukiman kumuh dan tidak ada lagi kendala yang terjadi.

Terkait dengan pengelolaan air limbah sebelum dilaksanakan program Kotaku ini air limbah yang dingalirkan belum efisien dan prasarana dan sarana belum memadai dan masyarakat membuat limbah langsung ke sungai yang mengakibatkan permukiman dan kawasan menjadi kumuh.

Terkait dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan masyarakat Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

“Bagi saya dulu sebelum Kotaku ini dilaksanakan banyak yang terjadi seperti warga gampong membuang sampah langsung ke sungai dan limbah-limbah yang ada yang dinyalirkan ke sungai, sampah-sampah yang ada juga dibuang disungai maka dari itu menyebabkan permukiman gampong seutui ini menjadi kumuh karena kurangnya kesadaran masyarakat sekitar.”⁵⁰

Berdasarkan hasil yang ada terhadap pengelolaan air limbah ini setelah dilaksanakan program Kotaku dan adanya permbangunan sarana dan prasarana yang sudah efisien terhadap pengelolaan air limbah.

Terhadap pengelolaan persampahan, masyarakat belum dapat mengetahui dengan baik adanya sarana bak sampah serta bagaimana menjadikan pengelolaan

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Rusdi Selaku Ketua BKM Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 26 Juni 2023

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Masyarakat Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 25 Juni 2023

sampah dan petugas bak sampah belum efisien dalam mengatasi permukiman kumuh dan perumahan kumuh.

Terkait dengan hasil wawancara peneliti lakukan dengan masyarakat Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

“Terjadinya suatu kendala dalam pengelolaan persampahan, dan sampah-sampah ini sudah banyak dan terkadang sampah-sampah tersebut tidak diambil oleh pengangkut sampah dalam tong tersebut yang telah tersedia yang diberikan oleh pemerintah daerah entah karena disengaja atau lupa yang mengakibatkan sampah tersebut menumpuk karena hal tersebut masyarakat langsung membuangnya ke sungai. Tetapi saya sendiri menyediakan tempat sampah, maka saya kewalahan kadang-kadang masyarakat ini banyak dari luar untuk membuang sampah itu kesungai, maka dari itu himbauan dari masyarakat seharusnya pihak pemerintah membuat papan pamflet untuk melarang membuang sampah kesungai akibat hal tersebut menjadi tumpang tindih yang terjadi.”⁵¹

Dari hasil yang didapatkan bahwa pemerintah melarang masyarakat membuang sampah langsung kesungai yang mengakibatkan pencemaran yang terjadi dan bisa merugikan masyarakat sekitar.

Ketidaksediaan fasilitas terhadap proteksi kebakaran ini yang menjadi sebuah ketidak efisien yang terjadi karena tidak tersedianya fasilitas sistem pengamanan kebakaran.

Terkait dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan masyarakat Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

“Dalam fasilitas terhadap pengamanan kebakaran belum efisien karena sarana dan prasana belum terpenuhi.”⁵²

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Masyarakat Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 25 Juni 2023

⁵² Hasil Wawancara dengan Masyarakat Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 25 Juni 2023

Maka dari itu setiap adanya permasalahan atau hambatan yang terjadi pasti membutuhkan peran masyarakat ialamnya untuk mengatasi permasalahan yang terjai sehingga keaktifan masyarakat sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan suatu program.

3. Kecukupan

Pada tahap ini adanya kepuasan dalam menyelesaikan masalah kumuh yang terjadi di Gampong Seutui dan sudah bisa dirasakan dari berbagai hal yang telah dilaksanakan. Wilayah yang tadinya kumuh dan tidak layak huni tersebut setelah adanya program kota tanpa kumuh ini membantu masyarakat sekitar mendapat kawasan yang tertata dengan rapi dan bersih dan menjadi tempat wisata masyarakat Kota Banda Aceh dengan menikmati keindahan krueng daroy yang telah di buat untuk menikmati keindahan Kota Banda Aceh.

Adapun hasil evaluasi menurut indikator kecukupan dalam kriteria program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah sebagai berikut:

Telah terlaksananya bangunan Gedung dari pencapaian dalam menghasilkan pekerjaan yang membangun kontruksi yang menyatu dengan tempat dan kedudukannya. Maka dari itu adanya fungsi suatu tempat sebagai tempat hunian atau tempat tinggal yang dibangun untuk melakukan kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.

Terkait dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan kepala desa Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

“Pembangunan beberapa gedung yang dibuat untuk membantu masyarakat sekitar terhadap rekreasi tempat bermain sore-sore masyarakat sekitar. Pembangunan infrastruktur dibantaran sungai tersebut terjadi beberapa permasalahan seperti perobohan rumah warga atau penggusuran yang dilakukan untuk mentata kembali kawasan permukiman agar tidak terjadinya kumuh walaupun kumuh tersebut tidak bisa dihilangkan sepenuhnya.”⁵³

Berdasarkan hasil yang ada terkait dengan pelaksanaan Kotaku ini pembangunan gedung yang dibuat sekarang sudah tertata lebih baik dan masyarakat sekitar dapat merasakan kenikmatan dan keindahan yang ada terhadap pembangunan yang telah dilaksanakan.

Dan juga adanya pembuatan jalan lingkungan yang terjadinya kawasan permukiman kumuh ialah kurangnya sarana dan prasarana dan infrastruktur pada suatu wilayah kawasan permukiman. Sebelum dilaksanakan program Kotaku ini Adanya permasalahan yang terjadi terhadap infrastruktur yang dibangun pada suatu kawasan permukiman seperti jalan lingkungan yang masih belum terjadi jika hujan menyebabkan becek dan bergengangnya air.

Terkait dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan kepala desa Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan program Kotaku ini saya sangat mendukung agar bisa membantu masyarakat sekitar terkait dengan mengatasi permukiman kumuh. Dan masyarakat sekitar tidak susah lagi dalam melakukan aktivitas karena dulu kurangnya fasilitas yang dimiliki. Tapi alhamdulillah sekarang masyarakat bersyukur bangunan yang dibuat bermanfaat.

⁵³ Hasil Wawancara dengan Bapak T. Amiruddin Selaku Kepala Desa Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 23 Juni 2023

Dengan hasil yang ada setelah dilaksanakan program ini dinilai bermanfaat bagi masyarakat untuk mendukung suatu sistem kehidupan masyarakat sekitar.

Terkait pengelolaan air limbah dalam sistem pengelolaan tidak sesuai dengan standar teknis yang mencapai 1,44% pengelolaan air limbah pada perumahan dan permukiman yang tidak memiliki sistem yang memadai secara individu, kelompok maupun terpusat.

Terkait dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan masyarakat Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

“Sebelum terlaksananya Kotaku ini aliran air limbah pada suatu daerah kawasan permukiman atau perumahan kumuh belum memiliki sistem yang memadai. Dan zat-zat yang terkandung dalam limbah air rumah tangga seperti sabun, deterjen, pengharum pakaian yang terkandung didalamnya yang mengakibatkan peningkatan limbah rumah tangga dapat membuat kerusakan pada kawasan permukiman tersebut.”⁵⁴

Maka berdasarkan hasil yang ada setelah program Kotaku ini dilaksanakan terkait dengan pengelolaan air limbah yang ada sudah membantu masyarakat sekitar dengan pembuatan saluran-saluran agar air limbah bisa mengalir yang diatungkan ke septik.

Terkait pengelolaan persampahan yang dikelola oleh masyarakat sekitar dan adanya pemberian tong sampah yang pemerintah berikan agar tidak ada lagi sampah yang berserakan yang terjadi tapi masyarakat tidak memanfaatkan

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Masyarakat Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 25 Juni 2023.

fasilitas tersebut masih adanya sampah yang berserakan yang terjadi dimana-mana dan masyarakat tidak menjaga permukiman tersebut dengan baik.

Terkait dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan fasilitator Kotaku terhadap pengelolaan persampahan yang ada di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman adalah sebagai berikut:

“Suatu daerah dikatakan kumuh itu berdasarkan indikator yang ada tidak bisa dilihat dengan kasat mata, seperti pengelolaan persampahan yang telah dibuat untuk menyelesaikan permukiman kumuh maka dari itu perlunya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat.”⁵⁵

Berikut adalah gambar pengelolaan persampahan yang ada di kawasan kumuh permukiman Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda aceh yang diberikan oleh pemerintah



Gambar 4. 10 Pengelolaan Persampahan

Sumber: Observasi Pada Tanggal 25 Juni 2023

Berdasarkan hasil yang ada terhadap dengan pengelolaan persampahan ini membantu masyarakat agar tidak membuang limbah rumah tangga lagi ke sungai yang dapat mencemari sungai.

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Budi Selaku Fasilitator Kotaku, Pada Tanggal 26 Juni 2023

4. Responsivitas

Responsivitas dapat di jelaskan sebagai tanggapan dan respon masyarakat yang berkenaan dengan kepuasan kebutuhan yang diberikan terkait dengan pelaksanaan program kotaku yang dijalankan pada Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Keberhasilan suatu program dapat dilihat terhadap dari tanggapan yang dirasakan oleh masyarakat Ketika pelaksanaan program tersebut sudah berjalan dan juga telah dilaksanakan. Responsivitas terhaap pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ini pada Gampong Seutui bahwa persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam penanganan permukiman kumuh yang ada pada Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.

Adapun hasil evaluasi menurut indikator responsivitas dalam kriteria program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah sebagai berikut:

Penataan kawasan permukiman yang dilakukan melalui kegiatan penataan pembangunan dan penyediaan infrastruktur permukiman dengan tujuan untuk merevitalisasi kawasan tersebut dalam jangka waktu yang Panjang. Adanya respon masyarakat terhadap pembangunan yang dilaksanakan agar menjadi kawasan permukiman yang nyaman, bersih dan menjadi ikon wisata bagi masyarakat sekitar.

Terkait dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan masyarakat Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

“Program Kotaku ini adalah program pemerintah yang dilaksanakan pada permukiman-permukiman yang mengalami permasalahan kumuh dan bisa

dijadikan sebagai studi banding antara suatu daerah dengan daerah lainnya. Dalam hal ini bisa dirasakan bahwa Kotaku ini ialah keuntungan sebelah pihak karena hanya orang tertentu saja yang dapat merasakan adanya perubahan yang terjadi setelah dilaksanakan Kotaku seperti penataan sebagian rumah warga tanpa dilakukan secara keseluruhan.”⁵⁶

Berdasarkan hasil yang ada terkait dengan bangunan gedung atau penataan bangunan yang dilakukan oleh pihak Kotaku respon yang didapatkan dari masyarakat sudah baik dan bangunan sudah tertata dengan rapi.

Sehingga adanya pelaksanaan pembangunan jalan lingkungan ini dilakukan sepanjang 915 meter lebar 3 meter dengan titik nol kegiatan di mulai dari jembatan jalan seulawah di samping masjid seutui dalam melakukan kegiatan ini ada sosialisasi kepada warga sekitar dan mendapatkan respon yang baik dari masyarakat terhadap pembangunan dan pelaksanaan program kotaku yang akan dibangun infrastruktur yang dapat diakses oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan BKM Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

“Sebagai badan keswadayaan masyarakat (BKM) Gampong Seutui yang berada dibawah naungan dari Kotaku sebelum melakukan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana maupun pembangunan infrastruktur tersebut pihak Kotaku bekerjasama atau sosialisasi dulu dengan keuchik, kepala dusun dan masyarakat sekitar terkait dengan pelaksanaan Kotaku ini.”⁵⁷

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas maka adanya respon masyarakat atau pihak BKM Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Masyarakat Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 24 Juni 2023

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Rusdi Selaku BKM Gampong Seutui, Pada Tanggal 27 Juni 2023

terhadap pelaksanaan pembangunan jalan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan akses jalan sudah memadai.

Drainase lingkungan terhadap suatu pembangunan ini ialah untuk mengalirkannya air yang terjadi pada permukaan dan atap bangunan dan dialirkan ke sungai, sehingga daerah tersebut terjadinya bencana banjir pada permukiman rendah. Dan kondisi drainase pada Gampong Seutui tersebut sebelumnya belum tertatanya dalam sistem jaringan drainase dan belum memenuhi pelayanan dalam penyaliran air.

Terkait dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan masyarakat Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

“Sebelum dilaksanakan Kotaku ini ada saluran got yang telah dibangun oleh masyarakat, tapi karena adanya proyek Kotaku ini dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah ditinggalkan saluran-saluran tersebut yang sudah dibuat oleh masyarakat dan ditimbun dan saluran tersebut menjadi hancur sehingga tertutup dan sekarang saya kewalahan karena saluran tersebut tidak berfungsi lagi dan hal tersebut menjadi kendala bagi masyarakat sebelum pelaksanaan Kotaku ini dijalankan. Maka dari itu setelah dibangun Kotaku ini saya berharap air ini dapat mengalir dengan baik agar tidak terjadinya lagi suatu kendala selanjutnya.”⁵⁸

Dari hasil yang ada terkait dengan drainase lingkungan ini masyarakat berharap agar tidak terjadi suatu kendala lagi setelah dilaksanakan program Kotaku ini dan bisa membantu masyarakat sekitar.

Adanya pengelolaan air limbah ini kurangnya saluran yang dibuat yang mengakibatkan tercampurnya air saluran dengan drainase lingkungan yang

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Masyarakat Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 25 Juni 2023.

mengakibatkan air sungai sekitar kurang baik karena terjadinya tempat pembuangan limbah sampah rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan masyarakat Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut

“Sebelum dilaksanakan Kotaku ini banyak masyarakat yang membuang sampah rumah tangga langsung ke sungai karena mereka bilang bisa dibawak langsung oleh arus sungai dan sebagian warga pun males untuk membuang pada tempat pembuang sampah umum jadi sebagian masyarakat membuang langsung kesungai tanpa bersusah-susah agar tidak menumpuknya sampah pada rumah warga.”⁵⁹

Dari hasil yang ada terkait dengan pengelolaan air limbah adanya saluran-saluran yang diperbaiki dan dibuat oleh aparat gampong dalam pelaksanaan program Kotaku dan bisa untuk membantu masyarakat sekitar.

Pengelolaan Persampahan, Masyarakat menunjukkan adanya kemampuan dalam menanggapi berbagai permasalahan sampah dan kebersihan yang dihadapi warga sekitar dan masih belum tampak baik walaupun pemerintah kecamatan meninjau pada masyarakat untuk bergotong royong dalam rangka membersihkan sampah yang tidak terjangkau oleh petugas kebersihan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan fasilitator Kotaku adalah sebagai berikut:

“Sebagai penggerak dari salah satu fasilitator Kotaku saya menyampaikan bahwa dilaksanakan program Kotaku ini bisa menjadi sebuah solusi bagi masyarakat agar tidak ada lagi kekumuhan baru yang terjadi seperti penumpukan sampah yang bisa mengakibatkan suatu gejala baru dalam permukiman kumuh dan perumahan kumuh tersebut.”⁶⁰

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Masyarakat Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 25 Juni 2023.

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Budi Selaku Fasilitator Kotaku, Pada Tanggal 26 Juni 2023

Berdasarkan hasil yang ada terhadap persampahan masyarakat dapat menjaga permukiman tersebut agar terbebas dari pencemaran lingkungan dan lebih memperhatikan agar tidak terjainya kekumuhan.

5. Ketepatan

Ketepatan dilihat sejauh mana program tersebut dilaksanakan dengan tujuan telah dijalankan atau belum dijalankan. Untuk menganalisa ketepatan suatu wilayah terhadap pelaksanaan program Kotaku ini untuk melihat adanya kekumuhan yang terjadi ketetapan kumuh baru. Tujuan dari ketepatan untuk melihat apakah program KOTAKU ini sesuai dengan kriteria program Kota Tanpa Kumuh yang di laksanakan.

Dengan demikian hasil evaluasi menurut indikator ketepatan dalam kriteria program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah sebagai berikut:

Bangunan Gedung, untuk mengetahui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam penanganan permukiman kumuh di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh ialah sebagai penanganan permukiman kumuh yang dilaksanakan oleh pihak Kotaku dalam memaksimalkan terhadap permukiman kumuh dan perumahan kumuh yang ada sebagai permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

Terkait dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan kepala desa Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut

“Terhadap kepadatan penduduk yang telah terjadi sebelum dilaksanakan Kotaku ini terjadinya sebagai macam masalah yang terjadi seperti permukiman kumuh dan setelah dilaksanakan Kotaku ini sudah membaik

dan adanya penggusuran rumah warga yang dilakukan untuk mentata kembali rumah warga agar menjadi Gampong seutui yang bersih dan nyaman.”⁶¹

Terhadap hasil yang ada dengan permasalahan yang terjadi seperti kepadatan bangunan maka pihak BKM Gampong Seutui yang berada dibawah naungan Kotaku ingin mentata ulang Gampong Seutui dengan baik yang tidak terjadinya permukiman kumuh baru. Dengan adanya program KOTAKU ini membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan permukiman kumuh.

Pembangunan jalan terhadap pendestrian dan ruang terbuka publik yang dilakukan pada awal tahun 2019. Sedangkan perencanaan dan persiapannya dilakukan di tahun 2018-2019. Terhadap pelaksanaan program KOTAKU ini adanya persiapan meliputi penggusuran sebagian bangunan yang terkena dampak dan adanya pembersihan sebagian lahan.

Terkait dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala desa Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

“Terkait dengan pelaksanaan program Kotaku pada tahun 2018-2019 adanya pembangunan yang dibuat seperti jembatan, sarana dan prasarana dalam pembuatan tersebut terjadinya penggusuran yang dilakukan pada sebagian rumah warga. Tapi penggusuran itu dilakukan dulu dengan cara komunikasi dengan baik pada masyarakat agar tidak ada insiden yang terjadi atau mungkin hal lainnya. Dan adanya sosialisasi yang dilakukan agar pembangunan yang dibuat bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar.”⁶²

Terhadap peningkatan yang dibuat dengan kualitas drainase lingkungan pada kawasan Seutui yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan bisa membantu

⁶¹ Hasil Wawancara dengan bapak T. Amiruddin Selaku Kepala desa Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Bana Aceh, Paa Tanggal 23 Juni 2023. ran K

⁶² Hasil Wawancara dengan Bapak T. Amiruddin Selaku Kepala Desa Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 23 Juni 2023.

masyarakat dalam mengatasi permukiman kumuh. Drainase yang dibuat ini sudah berjalan dengan baik.

Selanjutnya sebelum pembangunan Kotaku ini ketersediaannya air minum yang masih belum tersignifikasi maka dari itu pemerintah melakukan Gerakan 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukaan kumuh, dan 100 persen sanitasi layak. Dan program ini sudah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Terkait dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan masyarakat Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

“Sebelum dibangun Kotaku ini ketersediaan air minum yang kami dapatkan dari air galon ada juga masyarakat yang memasak air minum karena kan air minum itu kebutuhan sehari-hari, seperti kebutuhan memasak, minum dan lainnya. Tapi sekarang sudah sedikit terbantu lah adanya penyediaan air PDAM yang dibuat itu juga salah satu kemanfaatan juga bagi kami disini.”⁶³

Berdasarkan kesimpulan yang ada terhadap akses air minum ini sudah berjalanya program yang dibuat oleh pemerintah untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar di permukiman kumuh dalam mewujudkan permukiman yang layak huni.

Aspek terhadap pengelolaan air limbah yang dibangun adanya sarana dan prasarana terhadap pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan an permukiman kumuh dimana adanya pembuatan kloset yang tidak terhubung dengan tangki

⁶³ Hasil Wawancara dengan Masyarakat Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 24 Juni 2023

septikteng, dan tidak tersedianya sistem pengelolaan limbah setempat atau terpusat.

Terkait dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan masyarakat Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

“Sebelum dibangun Kotaku ini adanya banjir yang terjadi jika hujan deras karena terdapat beberapa dataran rendah, tapi kalau banjir besar tidak ada. Setelah dilaksanakan program Kotaku ini pemerintah membangun tanggul-tanggul agar tidak terulang lagi banjir-banjir yang bisa merugikan masyarakat sekitar terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi.”⁶⁴

Berdasarkan hasil yang ada terhadap pembangunan infrastruktur di kawasan Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh ini bisa membantu masyarakat setempat agar tidak ada kendala yang di alami masyarakat dan bisa membantu masyarakat sekitar tidka terjadinya lagi kumh baru walaupun tidak bisa dihilangkan sepenuhnya.

Ketepatan terhadap pengelolaan persampahan yang bertuang dan dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk peraturan yang telah ditetapkan dan membantu dalam pengelolaan persampahan dan dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan persampahan yang ada di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.

Terkait dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan kepala desa Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Masyarakat Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, Pada tanggal 24 Juni 2023.

“Terhadap suatu kebutuhan masyarakat sudah terpenuhi dan sarana dan prasarana yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Saya berharap selaku keuchik gampong seutui, masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas yang telah diberikan dapat menjaga lingkungan sekitar dari sampah-samoah atau limbah yang ada agar terbebas dari permukiman kumuh dan perumahan kumuh.”⁶⁵

Setelah dilakukan adanya tahap evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan sampah pada Gampong Seutui yang dapat dikatakan sudah cukup baik walaupun masih ada kekurangan seperti permasalahan yang terjadi terhadap pengelolaan persampahan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar kemudian penyediaan fasilitas kebersihan pembuangan sampah juga menjadi masalah dalam sikap kepedulian masyarakat menjaga lingkungan.

4.2.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Mengevaluasikan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

4.2.2.1. Faktor Pendukung

1. Tersedianya Anggaran

Anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada Gampong Seutui untuk pembangunan infrastruktur ini sangat bermanfaat dan anggaran yang di keluarkan hampir mencapai 14 Miliar dan infrastruktur yang di bangun beragam agar apat mengatasi kawasan kumuh yang ada di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh ini.

⁶⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak T. Amiruddin Selaku Kepala Desa Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 23 Juni 2023.

Hasil wawancara dengan kepala desa Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut

“Di masa akhir jabatan saya (keuchik) Gampong Seutui 2023 ini mendapatkan anggaran sekitar 500 Juta dari 6 desa seaceh, sekarang sedang pembuatan jalan, rabat beton, saluran-saluran lingkungan. Dan anggaran jika di kasih lagi sudah tidak tau lagi mau buat apalagi lagi karena sudah dibangun semua infrastruktur yang di butuhkan oleh masyarakat.”⁶⁶

Berdasarkan hasil di atas maka adanya anggaran yang di keluarkan oleh pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar dalam mengatasi permukiman kumuh.

2. Kerja Sama Pemerintah dalam Penanganan Permukiman Kumuh.

Dalam pelaksanaan program KOTAKU adanya pengawasan atau survey yang dilakukan oleh pihak pemerintah sebelum melakukan atau melaksanakannya program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Dalam hal ini maka perlu adanya keikutsertaan aparat Gampong terhadap pembangunan yang dibangun pada daerah tersebut.

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ini di selenggarakan dengan berbagai permasalahan yang terjadi pada daerah yang dibangun dan daerah yang dilakukannya program KOTAKU untuk mensejahterakan masyarakat sekitar permukiman. Pengawasan di lakukan pada setiap titik-titik dalam melakukan pembangunan infrastruktur dan adanya komunikasi dengan pihak BKM Gampong dalam mengatasi permukiman kumuh dan perumahan kumuh.

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak T. Amiruddin Selaku Kepala Desa Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 23 Juni 2023

Terkait dengan hasil wawancara yang di lakukan peneliti dengan Fasilitator KOTAKU terkait dengan pelaksanaan Program KOTAKU adalah sebagai berikut

“Terhadap pelaksanaan program Kotaku pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program ini mereka melihat dulu beberapa kriteria yang terjadi pada permukiman yang akan di laksanakan program ini setelah adanya beberapa kriteria atau permasalahan yang terjadi seperti drainase lingkungan, jalan lingkungan, air limbah, persampahan, baru pihak Kantor KOTAKU ini turun ke lapangan titik yang akan dibangunkannya infrastruktur atau sarana dan prasarana yang bisa menghilangkan kesan kumuh.”⁶⁷

Dapat disimpulkan bahwa sebelum pelaksanaan Kotaku ini pihak pemerintah melakukan survey atau sosialisasi terhadap pelaksanaan Kotaku ini yang dijalankan pada Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.

3. Adanya Website Pengelolaan Informasi dan Masalah (PIM)

Website pengelolaan informasi dan masalah (PIM) ini sebagai inovasi yang di buat oleh pihak kantor KOTAKU yang memberikan suatu kemudahan bagi para masyarakat yang ingin mengajukan dan ingin berargumen terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi pada masyarakat terhadap permukiman kumuh dan perumahan kumuh. Sehingga pihak kantor KOTAKU dapat melihat dan mengevaluasi permasalahan yang terjadi di masyarakat dalam program KOTAKU yang telah dilaksanakan. Dan pihak kantor KOTAKU ini dapat menyelesaikan masalah yang ada dari hasil keluhan masyarakat dalam sebuah aplikasi PIM tersebut.

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Budi Selaku Fasilitator KOTAKU, Pada Tanggal 26 Juni 2023

Terkait dengan hasil wawancara yang di lakukan dengan fasilitator KOTAKU terhadap aplikasi PIM ini adalah Sebagai berikut:

“Jadi setelah adanya website ini masyarakat yang ingin mengajukan pertanyaan dan keluhan yang ingin di sampaikan tidak perlu lagi ke kantor cukup melalui website tersebut aja dan masalah-masalah yang terjadi akan di selesaikan oleh pihak kantor Kotaku dan akan mengecek apa yang di sampaikan oleh masyarakat terkait dengan masalah yang ada. Dan hasil dari argument tersebut akan terdeteksi dan akan di website tersebut dan jika orang lain ingin mengeceknya berita tersebut masih tersedia.”⁶⁸

Dalam hal ini ada beberapa cara yang bisa di lakukan oleh masyarakat terhadap keluhan yang terjadi terhadap permukiman kumuh dan perumahan kumuh, hal itu bisa dilakukan dengan cara: SMS pengaduan, Pengaduan Online, laporan PIM, database pengaduan, aplikasi PIM. Dan hal ini membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan dan masyarakat mendapat pelayanan yang baik dan cepat agar tidak menjadi kesenjangan, dan pihak kantor Kotaku dapat segera diatasi permasalahan yang ada.

4.2.2.2 Faktor Penghambat

1. Kepadatan Jumlah Penduduk

Untuk mengetahui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam penanganan permukiman kumuh di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam memaksimalkan permukiman kumuh dan perumahan kumuh yang ada sebagai permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Budi Selaku Fasilitator Kotaku, Pada Tanggal 26 Juni 2023

Terhadap permasalahan yang terjadi pada kawasan permukiman kumuh Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh seperti kepadatan penduduk. Maka dalam hal ini pemerintah Kota Banda Aceh melaksanakan program Kotaku di Gampong Seutui untuk menyelesaikan permasalahan permukiman kumuh.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan kepala desa Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

“Dalam Hal ini saya sebagai keuchik Gampong Seutui sangat mendukung pemerintah dalam pelaksanaan Program Kotaku. Maka saya mendukung penuh pelaksanaan ini untuk menghilangkan kesan kumuh, walaupun tingkat kemiskinan masyarakat Gampong Seutui kalau kita sampaikan mereka punya mobil, motor pada setiap rumah, namun hanya saja rumah mereka yang nampak kumuh tetapi fasilitas yang dimiliki setiap rumah sudah terpenuhi.”⁶⁹

Berdasarkan hasil yang ada terhadap kepadatan penduduk yang terjadi maka adanya pengusuran rumah warga yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) untuk menata Gampong Seutui agar bersih dan terhindar dari permasalahan kumuh baru.

2 Kurangnya Keterlibatan Masyarakat dalam Penanganan Permukiman Kumuh.

Dalam pelaksanaan program KOTAKU di Gampong Seutui kurangnya dukungan masyarakat dalam mencapai keberhasilan pada program Kotaku dimana sebagian masyarakat tidak ikut serta dalam pelaksanaan program KOTAKU. Dan

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak T. Amiruddin Selaku Kepala Desa Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 23 Juni 2023

kurangnya keterlibatan masyarakat untuk mewujudkan permukiman yang layak huni dan terbebas dari permukiman kumuh.

Kemudian pola pikir masyarakat yang membuang sampah langsung ke sungai yang mengakibatkan pencemaran lingkungan, oleh karena itu dapat memicu permukiman kumuh.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan kepala desa Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

“Terkait dengan pelaksanaan Kotaku ini ada sebagian masyarakat yang ikut serta terhadap pelaksanaan program ini, ada juga kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program Kotaku ini. Karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga infrastruktur yang dibangun padahal infrastruktur tersebut dibangun untuk kemanfaatan bagi masyarakat sekitar.”⁷⁰

Berdasarkan hasil yang ada masyarakat yang tidak ikut serta dalam mendukung pelaksanaan program Kotaku juga tidak berpartisipasi dalam pelaksanaan program ini.

Berdasarkan hasil diatas menunjukkan bahwa tingkat evaluasi dan faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) pada Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh sudah berjalan secara maksimal dan membantu masyarakat sekitar dalam mengatasi permukiman kumuh terhadap sarana dan prasana yang telah dibangun.

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak T. Amiruddin Selaku Kepala Desa Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 23 Juni 2023

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil peneliti lakukan diatas yang berkaitan dengan pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pembahasan yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh sudah berjalan dengan baik terkait indikator evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) terhadap penataan kawasan permukiman, aspek terhadap jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ialah sebuah program yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengatasi permukiman kumuh.
2. Dengan demikian setiap kegiatan tentu ada faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor pendukung dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) pada Gampong Seutui diantaranya ketersedianya anggaran, adanya kerja sama pemerintah dalam penanganan permukiman kumuh, adanya website pengelolaan informasi dan masalah (PIM). Sedangkan faktor penghambat dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yaitu kepadatan jumlah

penduduk dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh.

5.2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas amaka maka peneliti ingin memberikan saran dan masukan sebagai berikut:

1. Untuk menjamin terlaksanakannya program Kotaku dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan mensejahterakan masyarakat perlunya peran masyarakat agar dapat terlibat dalam mengatasi kekumuhan dan menambahkan kesadaran akan rasa memiliki fasilitas yang telah dibangun atau telah di laksanakan, tidak hanya pada saat tahun pertama pembangunan saja meningkatnya dalam menjaga fasilitas tersebut tetapi untuk jangka Panjang.
2. Terhadap pelaksanaan Kotaku ini kurangnya masyarakat dalam menjaga kebersihan yang ada di lingkungan sekitar kurang maka dari itu peneliti mengajukan bahwa adanya kesadaran masyarakat dalam menjaga permukiman tersebut agar tidak terjadinya lagi permukiman kumuh baru. Dan ketersediaannya sarana dan prasarana yang bisa membantu masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Rujukan Buku:

- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hlm 209-210.
- Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta Timur: UNJ Press, 2021), hlm 8
- Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Surakarta: Sutoyo), tahun 2020, hlm 28-29
- Muh Firyal Akbar, *Studi Evaluasi Kebijakan*, (Gorontalo: Ideas Publishing), Tahun 2018, hlm 15-16
- Nuryanti Mustari, *Buku Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: PT. Leutika Nouvalitera) Cetakan Pertama 2015, hlm 63
- Rahmadi, *Buku Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press), Cetakan Pertama 2011, hlm 71
- William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada), Edisi kedua, hlm 612
- Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), hlm 84.

Daftar Rujukan Jurnal dan Skripsi:

- Abdullah Ramdhani, Muhammad Ali Ramdhani, *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*, *Jurnal Publik*, Vol.11; No.01; 2017. Hml. 3-4
- Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, *Jurnal Alhadrahah*, Vol. 17 No. 33 Januari – Juni 2018, hlm 91-94
- B. Liandri, T. Suheri, *Evaluasi Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Kelurahan Lebakgede Kecamatan Coblang Kota Bandung*, *Jurnal Wilayah dan Kota*, Volume 06 Nomor 02, 2020.
- Chadijah Arifin, *Skripsi, Evaluasi Program Kotaku Dalam Penanganan Kumuh Kota Parepare*, (Makassar, Universitas Bosowo Makassar, 2022)
- Dapit Saleh, *Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), Di Kota Suka Bumi*, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Volume 2 Nomor 5, 2021.
- Dewi Nelly Simanuntak, *Analisis Karakteristik Lingkungan Permukiman Permukiman Kumuh Di Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan*

Belawan, Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi, Vol. 05 No.01, hlm 11-14

Irma, Skripsi: Evaluasi Tata Kelola Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kota Makassar, Studi Kasus Kelurahan Parang Tambung, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019).

Rahmi Putri Joni, Skripsi: Evaluasi Pelaksanaan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Di Kota Pekanbaru, Studi Kasus: Kelurahan Pesisir Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, (Pekanbaru, Universitas Islam Riau, 2019), hlm 2

Ratih Anggraeni, Soesilo Zauhar, Siswidiyanto, Evaluasi Kebijakan Publik, Jurnal Administrasi Publik, Volume 1, Nomor. 1.

Umi Arifah, Kebijakan Publik Dalam Anggaran Pendidikan, Jurnal Manajemen Pendidikan, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2018.

Yulvira B. Tangketau, Skripsi, Evaluasi Program Kotaku Dalam Penanganan Permukiman Kumuh, (Makassar, Universitas Hasanuddin, 2021

Yunita Syahpriani, Muh. Ilham, Nuryanto, Evaluasi Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, Volume 12 Nomor 1, 2020

Daftar Rujukan Peraturan dan Perundang-Undangan:

Peraturan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri PUPR No. 14 tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan permukiman. Permukiman kumuh adalah yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan serta sarana dan prasarana.

Daftar Rujukan Website Resmi:

<https://kotaku.pu.go.id/page/6880/tentang-program-kota-tanpa-kumuh-kotaku>

<https://perkim.id/kawasan-kumuh/program-program-dalam-pencegahan-dan-peningkatan-kualitas-kawasan-kumuh/>

<https://pupr.acehprov.go.id/>

<https://perkim.id/profil-pkp/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-kota-banda-aceh/>

<https://kotaku.pu.go.id/view/9909/kolaborasi-memberi-keindahan-skala-kawasan-seutui-banda-aceh>

<https://kotaku.pu.go.id/view/7733/permen-pupr-nomor-28-prt-m-2016-tentang-pedoman-analisis-harga-satuan-pekerjaan-bidang-pekerjaan-umum>

<https://dishub.bandaacehkota.go.id/page-visi-dan-misi-walikota.html>



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Keputusan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 577/Un.08/FISIP/Kp.07.6/03/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh ;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBH) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 Nopember 2022.

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara 'pada tanggal 01 Februari 2023

MEMUTUSKAN
Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Saudara :

1. Dr. Yuni Roslaili, M.A. Sebagai pembimbing I
2. Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si. Sebagai pembimbing II

Untuk membimbing skripsi :

Nama : Riska Putri
NIM : 190802048

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Judul : Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Gampong Seutui Kecamatan Haiturrahman Kota Banda Aceh

KEDUA : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 01 Maret 2023
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN,
MUJI MULLA

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 2 Surat Permohonan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
Pemerintahan**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda
AcehTelepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-

raniy.ac.id

Nomor : B-0805/Un.08/FISIP. I/PP.00.9/03/2023

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Kantor Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Keuchik Gampong SeutuiBanda Aceh ,
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini
menerangkan bahwa:

Nama/NIM : RISKA PUTRI / 190802048

Semester/Jurusan : / Ilmu Administrasi Negara

Alamat sekarang : Lhoknga

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 29 Maret
2023an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



Eka Januar, M.Soc.Sc.

Berlaku sampai : 11
September 2023

Lampiran 3 Surat Pernyataan Sudah Melakukan Penelitian



SURAT KETERANGAN
432/Prov- Aceh/KKT-BNA/VI/2023

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini Korkot Banda Aceh dengan Ini Menerangkan :

Nama : Riska Putri
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Prodi : Ilmu Administrasi Negara Universitas UIN Ar-Raniry

Benar yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian kegiatan Program Kotaku di lokasi Skala Kawasan Gampong Seutui Kecamatan baiturahman Kota Banda Aceh.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Banda Aceh, 27 Juni 2023

Kemalahayati
Korkot Banda Aceh

Koordinator Kota Banda Aceh

Jl. Tpk. Syekh Madawati No. 19F Kampung Bure Kec. Baiturahman Kota Banda Aceh
Provinsi Aceh Kode Pos 21242 Hp : 081294304159 email: acb.kkt@psmi.com

**Lampiran 4 Keputusan Wali Kota Banda Aceh Nomor 422 Tahun 2021
Tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh**



WALIKOTA BANDA ACEH

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 422 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA BANDA ACEH

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan, menyatakan penetapan lokasi perumahan kumuh dan kumuh wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kota Banda Aceh tentang pengurangan luasan kawasan kumuh tahun 2020 maka dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Walikota Nomor 540 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Banda Aceh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Walikota;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 7. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Banda Aceh meliputi 20 (Dua Puluh) kawasan, di 8 (Delapan) kecamatan, dengan luas total sebesar 451,40 Ha (empat ratus lima puluh satu koma empat puluh hektar).
- KEDUA** : Penjabaran mengenai Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh serta Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 540 Tahun 2020 tentang Keputusan Walikota Banda Aceh Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Banda Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 2 Juni 2021, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
 pada tanggal 12 Juli 2021 M
 2 Dzulhijjah 1443 H



AR-RANIRY

Lampiran 5 Pedoman Wawancara

No	Indikator	Pertanyaan	Informan
1	Efektivitas	Apakah hadirnya Kotaku bisa menjadi alternatif dalam mengatasi permukiman kumuh?	Kepala Desa Gampong Seutui
2	Efisiensi	Apakah program Kotaku ini bermanfaat bagi masyarakat dan Apakah program Kotaku ini sudah berjalan sesuai dengan SOP yang ada?	
3	Kecukupan	Bagaimana sarana dan prasarana yang ada dalam penerapan Kotaku ini, apakah sudah terpenuhi?	
4	Responsivitas	Bagaimana peran masyarakat dalam pelaksanaan program Kotaku ini Dan Apakah masyarakat ada berpartisipasi dalam pelaksanaan program ini?	
5	Ketepatan	Apakah setelah dilaksanakan program Kotaku ini adanya evaluasi yang dilakukan?	

No	Indikator	Pertanyaan	Informan
1	Efektivitas	Bagaimana pendapat bapak terkait dengan permasalahan Kotaku?	Fasilitator KOTAKU
2	Efisiensi	Apakah pelaksanaan program Kotaku ini menjadi solusi dalam menangani permukiman kumuh?	
3	Kecukupan	Apakah adanya penurunan setelah dilaksanakan program Kotaku di Gampong Seutui yang diselenggarakan oleh pihak kantor Kotaku?	
4	Responsivitas	Bagaimana respon pihak Kotaku terhadap pelaksanaan Kotaku di Gampong Seutui?	
5	Ketepatan	Bagaimana menentukan sebuah wilayah tersebut menjadi sarana program Kotaku?	

No	Inikator	Pertanyaan	Informan
1	Efektivitas	Bagaimana peran BKM dalam program Kotaku ini	BKM Gampong Seutui
2	Efesiensi	Apa yang menyebabkan Gampong Seutui sebagai kota kumuh?	
3	Kecukupan	Bagaimana pemeliharaan terhadap Kotaku yang telah dibangun?	
4	Responsivitas	Apakah adanya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Kotaku ini?	
5	Ketepatan	Kenapa Gampong Seutui ini bisa di laksanakan program Kotaku ini?	

NO	Indikator	Pertanyaan	Informan
1	Efektivitas	Bagaimana pendapat masyarakat setelah dilaksanakan program Kotaku?	Masyarakat
2	Efesiensi	Bagaimana perbedaan sebelum dan sesudah pelaksanaan Kotaku?	
3	Kecukupan	Apakah sarana dan prasarana yang dibangun sudah mencukupi dalam mengatasi kumu?	
4	Responsivitas	Bagaimana respon masyarakat terhadap pelaksanaan program Kotaku ini?	
4	Ketepatan	Apakah pembangunan Kotaku ini adanya penggusuran rumah warga yang dilakukan?	

Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Bapak T. Amiruddin Selaku Kepala Desa Gampong Seutui
Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh



Wawancara dengan Bapak Budi Selalu Fasilitator KOTAKU Kota Banda Aceh



Wawancara dengan Bapak Rusdi Selaku BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat)
Gampong Seutui



Wawancara dengan Masyarakat Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota
Banda Aceh terhadap pelaksanaan Program KOTAKU